



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH RAPAT DENGAR PENDAPAT  
KOMISI X DENGAN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS RI, KEPALA BPPB  
KEMENDIKBUDRISTEK RI, KEPALA BSKAP KEMENDIKBUDRISTEK RI,  
KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL RI**

**Tahun Sidang** : 2022 - 2023  
**Masa Persidangan** : III  
**Jenis Rapat** : Rapat Kerja  
**Sifat Rapat** : Terbuka  
**Hari, Tanggal** : Selasa, 14 Februari 2023  
**Waktu** : 14.00 WIB s.d. 17.05 WIB  
**Tempat** : Ruang Rapat Komisi X DPR RI Gedung Nusantara I,  
Lantai 1. Jl. Jenderal Gatot Subroto - Jakarta.  
**Ketua Rapat** : Agustina Wilujeng Pramestuti, SS., M.M. / F-PDI P  
**Sekretaris Rapat** : Dadang Prayitna, S.IP.,M.H.  
**Acara** : Membahas peningkatan Literasi Nasional terkait indeks literasi berdasarkan Perpustakaan RI dan UNESCO (tindak lanjut RDP Komisi X dengan Kepala Perpustakaan RI tanggal 24 November 2022).

**Hadir** : **PIMPINAN :**  
1. Agustina Wilujeng Pramestuti, SS., M.M.  
2. Dr. H. Abdul Fikri Faqih, M.M.

**ANGGOTA :**

**F-PDI PERJUANGAN :**

1. dr. Sofyan Tan
2. Putra Nababan
3. Rano Karno, SIP.
4. Andreas Hugo Pareira

**F-P.GOLKAR :**

1. H. Muhammad Nur Purnama Sidi
2. Adrian Jopie Paruntu

**F-P.GERINDRA :**

1. Prof. Dr.Ir. Djohar Arifin Husin
2. Hj. Himmatul Aliyah, S.Sos., M.Si.
3. Dr. Ir. H. Sodik Mudjahid, M.Sc.

**F-P.NASDEM :**

1. Ratih Mega Sari Singkaru, M.Si.
2. Lisda Hendrajoni, S.E., M.MTr.
3. Dra. Hj. Tina Nur Alam, M.M.
4. Moh. Haerul Amri, SP.

**F-PKB :**

1. Dr. H. Muhammad Kadafi, S.H., M.H.
2. Drs. H. Bisri Romly, M.M.
3. Drs. H. Andi Muawiyah Ramly, M.Si.

**F-P.DEMOKRAT :**

-

**F-PKS :**

1. H. Mustafa Kamal, S.S.

**F-PAN :**

-

**F-PPP :**

1. Hj. Illiza Saaduddin Djamal, S.E.

**UNDANGAN :**

1. Kepala Perpustakaan Nasional RI (Drs. Syarif Bando, M.M.);
2. PLT Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat Dan Kebudayaan Kementerian PPN/ BAPPENAS (Dr. Ir. Subandi., MSc);
3. Kepala Badan Standar Kurikulum Dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek RI (Anindito Aditomo, S.Psi., M.Phil., Ph.D.);
4. Kepala Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa Indonesia Kemendikbudristek RI (Prof.H. Endang Aminudin Aziz, M.A., Ph.D.);

**JALANNYA RAPAT:**

**KETUA RAPAT / WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI / F-PDIP (AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI, S.S., M.M.):**

Acara tertundanya sangat lama. Ada beberapa agenda mendadak dari DPR yang harus kita ikuti, bisa kita mulai ya. Loh, Pak Andreas sudah selesai makan?

*Assalamualaikum warahamtullahi wabarakatuh,*  
Salam sejahtera untuk kita semua,  
Om swastiastu,  
Namo buddhaya,  
Salam kebajikan, dan  
Selamat sore,

Yang kami hormati Plt bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Kementerian PPN / Bappenas RI, Dr. Ir. Subandi, M.Sc., beserta jajarannya,  
Kepala Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek RI, Prof. Endang Aminudin Aziz, M.A., Ph.D., beserta jajaran,  
Kepala Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek RI Bapak Anindito Aditomo, S.Psi., M.Phil., Ph.D., beserta jajarannya,

Banyak sekali gelarnya.

Kepala Perpustakaan Nasional Indonesia, Pak Muhammad Syarif Bando, beserta jajarannya,  
Pak Fikri dan para Anggota Komisi X yang terhormat,

Ini 31 orang Pak, sebagian besar masih ada di ruang makan dan ada beberapa tugas-tugas di akhir masa sidang ini yang harus kita selesaikan.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. karena atas rahmat dan karunia-Nya kita diberikan kesehatan dan kesempatan mengikuti Rapat Dengar Pendapat pada hari ini dalam keadaan sehat *wal'afiat*.

Menurut laporan dari sekretariat, saat ini telah ditandatangani 31 anggota dari Anggota Komisi 10 dan ada 9 Fraksi. Dengan demikian, kuorum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang tata tertib telah terpenuhi.

Dengan mengucap "*Bismillahirrahmanirrahim*", perkenankan kami membuka RPD pada hari ini dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

**(RAPAT:DIBUKA)**

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 14.00 WIB)**

*P*

**(KETUK PALU 1 KALI)**

**(RAPAT TERBUKA UNTUK UMUM)**

Bapak - Ibu yang kami hormati,

Agenda RDP hari ini adalah membahas peningkatan literasi nasional terkait indeks literasi berdasarkan perpustakaan RI dan UNESCO. Hal ini merupakan tindak lanjut Komisi X dengan Kepala Perpustakaan RI pada tanggal 24 November tahun 2022, disetujui Bapak - Ibu Anggota Komisi?

**(RAPAT:SETUJU)**

**(KETUK PALU 1 KALI)**

Terima kasih.

Sebelum para narasumber menyampaikan paparan, dari meja Pimpinan mengingatkan kembali bahwa berdasarkan Pasal 98 Ayat (3) huruf A dan huruf *(suara tidak jelas ... 03.27)* Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 terhadap perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, tugas Komisi di bidang pengawasan adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup Komisi. Tugas Komisi juga adalah untuk melakukan penganggaran terhadap segala hal yang berkaitan dengan tugas Komisi dimaksud.

Atas dasar pasal-pasal yang telah dibacakan tersebut, maka RDP ini merupakan perwujudan amanat Undang-Undang.

Bapak-Ibu hadirin yang kami hormati.

Masyarakat berpengetahuan atau masyarakat literat menjadi fondasi sosial yang sangat kokoh untuk mendorong proses transformasi masyarakat menuju kehidupan yang sejahtera.

Bonus demografi Indonesia dan peningkatan jumlah penetrasi internet di Indonesia yang melonjak sampai dengan 77,02% penduduk Indonesia menjadi tantangan yang perlu dihadapi.

Arahan Presiden Republik Indonesia dalam rencana pembangunan jangka menengah tahun 2020 sampai 2024 adalah pembangunan sumber daya manusia yang merupakan salah satu strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran visi Indonesia 2045.

Arahan kebijakan strategis tersebut adalah membangun sumber daya manusia pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan mengundang talenta global.

Dalam upaya mewujudkan sumber daya manusia berkualitas dan memiliki daya saing tersebut, maka pembangunan kemampuan literasi masyarakat adalah sebuah keharusan.

Menurut UNDP dalam *education for our global monitoring report* tahun 2006 menjelaskan adanya hubungan yang kuat antara pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan manusia melalui literasi. Korelasi kuat antara *gross domestic product* per kapita dengan indikator pembangunan seperti angka harapan hidup, kematian bayi, hak politik dan sipil, serta beberapa indikator kualitas lingkungan terutama literasi orang dewasa diartikan dalam indeks pembangunan manusia.

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN tahun 2020-2024, khususnya agenda pembangunan meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing dan membangun kebudayaan dan karakter bangsa. Pembangunan karakter dilaksanakan secara holistik dan integratif dengan melibatkan segenap komponen bangsa.

Arah kebijakan pembangunan dalam pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa berkaitan dengan peningkatan literasi, inovasi dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan dan berkarakter.

Tingkatan budaya literasi mencakup pengembangan budaya kegemaran membaca, meningkatkan akses dan kualitas layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial dan peningkatan pembukuan dan konten literasi.

Bapak-Ibu hadirin yang kami hormati.

Berdasarkan RDP tanggal 24 November tahun 2022 terkait indeks literasi berdasarkan Perpustnas RI dan UNESCO, maka Komisi X memberikan catatan agar Perpustakaan RI secara aktif berkoordinasi dengan Kemendikbudristek RI agar indeks literasi Perpustakaan RI menjadi alat ukur dan standar literasi secara nasional, sekaligus pembanding hasil UNESCO.

Komisi X juga mendorong Perpustnas RI membuat skema sosialisasi dan pendampingan ke pemerintah daerah, sehingga indeks literasi Perpustakaan RI dapat dilaksanakan oleh pusat dan daerah sebagai sebuah kebijakan.

Bapak-Ibu hadirin yang kami hormati.

Dalam rangka penguatan literasi ada beberapa pertanyaan yang perlu mendapatkan penjelasan dari Bapak-Ibu yang hadir, diantaranya adalah:

1. Kepala Perpustakaan sekolah banyak yang tidak memiliki kompetensi, kompetensi sebagai pustakawan dan penilaian kinerjanya diukur

- berdasarkan kebijakan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2008 tentang standar tenaga administrasi sekolah atau madrasah bukan berdasarkan Standar Nasional Perpustakaan;
2. Dalam nilai kinerja kepala sekolah belum ada indikator mengenai kualitas pengelolaan yang berkaitan dengan pengelolaan perpustakaan sekolah;
  3. Belum adanya regulasi yang mendorong penggunaan dana BOS untuk pengelolaan perpustakaan sekolah dan;
  4. Adanya regulasi yang menghambat Perpusnas RI untuk mendukung pengelolaan dan pengembangan koleksi perpustakaan sekolah seperti pengadaan buku untuk perpustakaan sekolah.

Bapak-Ibu yang kami hormati.

Demikian catatan Komisi X agar menjadi pertimbangan dalam pembahasan agenda RDP hari ini, selanjutnya untuk efektivitas waktu kami persilahkan bagi para tamu undangan untuk menyampaikan paparannya sesuai dengan agenda RDP ini. Namun sebelumnya kita perlu kesepakatan waktu, kita akan selesai pukul 5, 5 Bapak-Ibu, Pak Fikri?

**(RAPAT:SETUJU)**

**(KETUK PALU 1 KALI)**

Baik. Kami persilakan yang pertama adalah siapa dulu nih? Perpusnas dulu Pak? Baik, dari Perpustakaan Nasional, Bapak Muhammad Syarif Bando, waktu kami persilakan.

**KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (Drs. SYARIF BANDO, M.M.):**

*Bismillahirrahmanirrahim,  
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,  
Selamat sore,  
Salam sejahtera untuk kita semua,  
Shalom,  
Om budaya,  
Rahayu, dan  
Salam kebajikan,*

Yang terhormat dan sangat kami muliakan Pimpinan Komisi X DPR RI, Bersama seluruh Anggota Komisi X DPR RI, Yang kami hormati mitra kami, Plt Deputi bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan/Bappenas, Bapak Dr. Ir. Subandi, M.S., kemudian juga, Bapak Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan Bappenas, Bapak Dr.Amanih, PhD., kemudian, Kepala Badan Pengembangan dan Pembudayaan Bahasa Kemendikbud Dikti, Bapak Prof. Endang Aminudin, M.A., Ph.D., kemudian,

Bapak Kepala bidang Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Bapak Anindito Aditomo, S.Psi., M.Phil. dan, Temen-temen yang lain,

Berdasarkan surat dari Sekjen yang kami terima pada tanggal 7 Februari perihal membahas tentang peningkatan literasi terkait indeks literasi berdasarkan Perpustakaan Nasional RI, tindak lanjut dari RDP pada tanggal 24 November, maka perkenankan kami menyampaikan paparan sebagai berikut:

Halaman 4 tentu ini normatif Undang-Undang Dasar 43 menjelaskan tentang fungsi Perpustakaan Nasional, kemudian tujuan dan sasaran rencana strategis. Yang pertama adalah terwujudnya budaya literasi masyarakat Indonesia dengan capaian kurang lebih 71 atau kategori tinggi pada 2024 bersamaan dengan berakhirnya periode kedua Bapak Presiden.

Kedua, terwujudnya perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan dan berbasis inklusi sosial untuk memperkuat budaya literasi, targetnya adalah nilai budaya gemar membaca kita 71,3 dan indeks pembangunan literasi mencapai 15.

Selanjutnya,

Peta strategis saya kira ini kami tidak akan bahas, kemudian di dalam mukadimah Undang-Undang jelas tugas kita sama semua dalam mencerdaskan anak bangsa, menyejahterakan, memperkuat persatuan dan ikut menjaga perdamaian.

Kemudian selanjutnya. Kami adalah salah satu Perpustakaan Nasional di dunia yang mengajukan formasi tentang perubahan paradigma perpustakaan di era gempuran *distruption* informasi, di mana 10% kami alokasikan untuk sumber daya perpustakaan untuk *me-manage collection* dan 20% untuk *me-manage knowledge* dan target kami adalah perpustakaan menjangkau masyarakat dengan 70% *transfer knowledge*.

Kemudian, sesuai dengan RPJM Bapak Presiden kami merumuskan literasi adalah kedalaman pengetahuan seseorang terhadap satu subjek ilmu pengetahuan tertentu yang parameternya dapat diimplementasikan dengan inovasi dan kreativitas untuk memproduksi barang dan jasa yang berkualitas tinggi dan dapat dipakai untuk memenangkan persaingan global, sehingga formulasi ini kami berharap diikuti dengan 5 tingkatan literasi yang kemudian nanti kaitannya dengan UNESCO seperti kita tau bahwa, 10 perguruan tinggi negeri terbaik dunia itu ada pada tingkatan kelima. Di mana pada tingkatan kelima hampir pengaruh dari perguruan tinggi untuk industri-industri dalam memproduksi barang dan jasa itu keterlibatannya sangat jelas, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Pimpinan sidang.

*Nah*, ketika bicara tentang baca tulis itu tentu saja kami sangat sepakat dengan apa yang disampaikan tadi di dalam catatan penting Komisi X bahwa, kepala sekolah di semua sekolah dasar sampai ke SLTP itu tidak memiliki

kompetensi tentang pengelola perpustakaan dan juga nilai kinerja kepala sekolah tidak dikaitkan dengan perpustakaan, sehingga persoalan yang kita hadapi dari hasil riset yang dilakukan oleh EOCED sebagai perpanjangan tangan dari UNESCO dan juga PISA selalu menunjukkan bahwa tingkat kemampuan membaca tulis hitung anak kita itu sangat rendah.

Perlu kami laporkan kepada Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi X DPR RI dan juga mitra, bahwa hasil diskusi kami dengan Profesor Munandar selaku delegasi tetap kita di menyampaikan, bahwa "sebenarnya UNESCO tidak punya standar untuk setiap negara, masing-masing negara mengembangkan dengan caranya sendiri, tetapi dengan apa yang dilakukan oleh EOCED dan juga PISA juga bisa untuk melakukan tingkat kemampuan pemahaman makna bacaan bagi seluruh siswa dengan mengambil responden yang berbeda sesuai dengan jumlah penduduk di setiap negara itu dapat kita terjemahkan pada lima tingkatan literasi yang kami susun".

Yang pertama, EOCED memulai dengan tingkat kemampuan membaca tulis hitung pada peserta yang diambil sebelum responden. Yang kedua akses pembacaan yang terjangkau akurat, di sini menjadi titik yang paling lemah bagi Indonesia di mana anak-anak sangat tidak memiliki kemampuan untuk penelusuran sarana bibliografi perpustakaan. Dan kemudian yang ketiga yang disinkronisasi adalah Indonesia di justifikasi cuma 15% dari sekian sampel yang ditetapkan, anak Indonesia hanya mengerti satu informasi dari naskah yang ditawarkan rata-rata tebalnya 25 halaman. Yang karena itu berdampak sangat signifikan kepada poin keempat dan kelima pada level pendidikan tinggi kita, tetapi tentu ini bukan dalam koridor kami nanti Bapak Prof. Endang akan menyampaikan.

C, indeks literasi masyarakat, oh kami rumuskan pertama kemampuan membaca, menulis, berhitung dan perilaku berbahasa, kemudian perilaku mengakses sumber informasi dan membaca, perilaku memahami semuanya atau informasi, perilaku mengemukakan ide atau gagasan dan perilaku menciptakan kreasi atau mengembangkan produksi.

Kemudian, pemetaan rujukan dimensi integritas masyarakat ini yang dari Kemendikbud digital kominfo dan seterusnya di halaman 14.

Kerangka konseptual indeks literasi masyarakat, kami sampaikan sebagai berikut, indeks literasi masyarakat 2022 dimensinya adalah kemampuan berbahasa, membaca, menulis, berbicara dan berhitung dan seterusnya. Kemudian indikatornya adalah indikator-indikator 1, 2, dan seterusnya yang kami tetapkan di belakang sini, di halaman 16, yaitu perilaku membaca ada kaitannya kemampuan membaca, kemampuan menulis dan perilaku berbahasa dan seterusnya.

Kemudian skala indeks literasi masyarakat di halaman 17, kategori masyarakat yang sangat rendah jika 0,001 sampai dengan 20 dan masyarakat literasi rendah kalau 20,01 sampai dengan 40, kemudian sedang jika 40,01 sampai 60 dan masyarakat literasi tinggi jika 60,01 sampai 80, kemudian literasi



unggul kalau 80,01 sampai 100. Ini standar yang kami ajukan, tentu saja ini juga harus mendapat *review* dan validasi dari *stakeholder* kita termasuk Dikbud.

Lalu kita menurut survei yang kami lakukan skor dimensi itu perilaku membaca nilainya 66,97 kategori baik. Akses sumber informasi dan membacakan cukup memang rendah, karena kami sedang menyampaikan data sebelumnya bahwa UNESCO menetapkan standar minimal 3 buku baru bagi saya setiap orang yang potensi membacanya ada setiap tahun, sementara Indonesia hasil survei kami dari Sabang sampai Merauke itu rata-rata satu buku ditunggu 90 orang dan ini menjadi masalah nasional.

*Nah* ini mungkin menjadi bahan acuan kita nanti untuk Dikbud, di satu sisi Dikbud tentu lebih fokus menangani penyediaan buku bacaan di sekolah, mulai dari praktekannya, sementara juga Perpustakaan Nasional harus bicara tentang masyarakat yang sudah di luar pendidikan formal dan non formal sebagaimana acuan Perpustakaan Nasional dalam manifesto UNESCO bahwa, bangku terakhir bagi semua orang yang tidak lagi ke pendidikan adalah perpustakaan umum, ini menjadi tantangan.

Kemudian skor indikator literasi masyarakat secara nasional ini dapat dilihat pada halaman 19.

Ibu Pimpinan Komisi X dan,  
Seluruh Anggota dan,  
Mitra yang kami hormati,

Kami sampaikan Hasil Kajian Indeks Pembangunan Masyarakat 2022. Indeks pembangunan literasi masyarakat merupakan kajian yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional untuk mengetahui tingkat pembangunan literasi masyarakat yang diperoleh dari unsur-unsur pembangunan literasi masyarakat yang bersumber dari data sekunder dan aspek masyarakat sebagai berikut.

Formula indeks pembangunan literasi kami rumuskan sebagai berikut, indeks literasi, indeks pembangunan literasi masyarakat dikaitkan dengan unsur yang berpengaruh dibagi dengan aspek masyarakat. Ada 7 unsur yang berpengaruh kami tetapkan di sini antara lain; adalah pemerataan layanan perpustakaan, yang kedua ketercukupan, ketercukupan koleksi perpustakaan yang diukur dalam rasio jumlah buku yang terbit dan beredar di masyarakat dengan masyarakat, dan yang ketiga ketercukupan tenaga perpustakaan yang ada tersebar di perpustakaan desa, perpustakaan sekolah dasar, perpustakaan khusus dan perpustakaan-perusahaan kecamatan, perpustakaan kabupaten dan provinsi. Kemudian yang keempat, tingkat kunjungan masyarakat per hari ke perpustakaan, yang kelima perpustakaan yang dibina sesuai dengan standar, yang keenam keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi tentang pentingnya ilmu pengetahuan dalam merubah kehidupan kita sehari-hari dan yang ketujuh jumlah anggaran perpustakaan di setiap unit yang ada.

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dari Sabang sampai Merauke yang kami lakukan pada 4 tahun terakhir bisa dilihat petanya di grafik halaman 24. Di 2019 itu kita lihat pada warna biru, kemudian 2020 pada yang orange, kemudian yang 2021 abu-abu dan kemudian yang kuning pada 2022. Ini menunjukkan bahwa, hasil penelitian yang kami lakukan selama 4 tahun terakhir tetap menunjukkan ada peningkatan, tetapi sangat lambat karena tidak diikuti dengan peningkatan sarana-prasarana dan tenaga, serta anggaran yang memadai, sehingga hasilnya sampai dengan 2022, Indeks Pembangunan Literasi kita baru sampai pada skala 64,48 atau kalau diskorsing 13,55 ini masih angka yang sangat sedang.

Kemudian, lanjut kepada tingkat kegemaran membaca adalah kajian yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional sebagai tolok ukur masyarakat berpengaruh atau literat melalui pengukuran dimensi yang mempengaruhinya antara lain; tentang frekuensi membaca, durasi membaca, jumlah buku yang dibaca, frekuensi akses internet dan durasi akses internet.

Kami kategorikan dalam 5 kelompok, jika nilai yang diperoleh 0 sampai 20 itu kategorinya sangat rendah dan kalau 20,1 sampai 40 kategorinya rendah, kemudian 40,1 sampai 60 itu sedang, kemudian 60,1 sampai 80, kemudian 80,1 sampai 100 sangat tinggi.

Metode penentuan sampel. Tingkat kegemaran membaca nasional itu kami ambil pada 102 kabupaten/kota, mohon maaf pada saat itu belum ditambah 4 provinsi, jadi di sini masih 34 provinsi dengan total responden 10.200 orang.

Kemudian, juga di tingkat nasional kami mengambil 102 kabupaten/kota 34 provinsi target 306 perpustakaan desa, kemudian di setiap kabupaten/kota kami mengambil target 3 desa dan kelurahan, sehingga kami meyakini bahwa pemilihan lokus responden dari Sabang sampai Merauke terakomodir.

Karakteristik responden pendidikan dilihat dari pendidikan terakhir ini ada tingkat SD atau tidak tamat rata-rata sekitar 3%, yang kemudian SLTP itu 10%, SMK itu ada 29%, D1/D2/D3 6,76%, kemudian S1 sekitar 38% dan kemudian S2/S3 sekitar 6,35%.

Hasil daripada pengolahan data yang kami lakukan terhadap 11.150 responden dengan instrumen; pertama bermain di luar rumah itu mengambil 4,5%, bermain game digital itu 5,1%, mengakses sosial media 16,1%, membaca mengakses informasi di internet 19,8%, ini merupakan tertinggi. Jadi memang ini menjadi acuan kami untuk merubah paradigma perpustakaan dalam bentuk digital karena memang masyarakat sepertinya sudah mau bergeser dari bahan cetak.

Kemudian belajar mengerjakan tugas-tugas itu 96%, olahraga 6,3%, kemudian kegiatan lainnya 6,9%, membaca bahan tercetak masih kategori tinggi karena masih ada kurang lebih 13,2%, kemudian istirahat atau tidur 11%, kemudian menonton televisi 7%.

Sarana prasarana di rumah yang mendukung kegemaran membaca kita lihat di sini, koleksi buku 17%, akses internet 17%, kemudian majalah 6,9, komputer laptop 17,8%, handphone 28% tertinggi ya, audio video player 4,5%, smart TV 7,5% dan memang ada 0,2% yang sama sekali tidak memiliki fasilitas itu.

Karakteristik membaca dari 11.158 responden itu pembacaan tercetak 33,5%, bahan bacaan audio visual 30,5%, kemudian bahan bacaan elektronik 36%.

Kunjungan ke perpustakaan, ini sekaligus meralat laporan yang terdahulu tentang rentang kunjungan perpustakaan karena salah data. Pada saat terdahulu hanya melaporkan jumlah kunjungan ke Perpustakaan Nasional, kemudian yang di sini adalah kunjungan masyarakat Indonesia ke semua jenis perpustakaan yang tersebar di daerah, baik perpustakaan umum, kabupaten/kota, desa, TBM dan juga ke rumah-rumah pintar.

Dari data yang ada, kunjungan masyarakat kita ke perpustakaan sudah menunjukkan yang paling tinggi di kabupaten/kota, kemudian di perpustakaan desa dan di perpustakaan provinsi.

Aktivitas membaca masyarakat Indonesia. Membaca sebanyak 5 kali per minggu frekuensinya, kemudian dimensi durasi membaca rata-rata 1 jam 37,8 menit per hari. Kami ingin melaporkan kepada yang terhormat Bapak-Ibu Pimpinan Komisi X dan seluruh Anggota dan juga mitra bahwa, berdasarkan hasil *world reading habits* bisa dimunculkan barangkali, yang menempatkan Indonesia sebagai urutan 16. Ini urutan 16 pada 2021 dengan durasi membaca 6 jam lebih dalam seminggu dari hasil kajian terakhir kami kalau dimasukkan, tapi kami melaporkan bahwa *world reading habits* ini melakukan riset per 3 tahunan, jadi sebenarnya akhir tahun ini baru mereka melakukan lagi.

Nah, hasil kajian kami di 2021 kalau 1 jam 37 menit per hari totalnya adalah 9 jam,56. Itu data yang menunjukkan sekarang Indonesia akan berada urutan kedua di bawah India dan di atas Cina, kalau hari ini dimasukkan dengan data survei ini, tetapi ini tidak penting bagi kita untuk segera pindah ke sana. Yang penting adalah bagaimana betul-betul terjadi perubahan paradigma di dalam masyarakat kita tentang posisi Indonesia dalam berjuang di antara bangsa-bangsa lain di dunia. Kemudian membaca 5 bahan bacaan per 3 bulan, kemudian frekuensi akses internet 5-6 kali per minggu dan kemudian durasi akses internet.

Kegemaran membaca masyarakat di halaman 34, tingkat kegemaran baca Indonesia di 2019-2024 itu kategorinya pada saat ini 3,90. Ini kategori yang sebenarnya menuju ke baik tapi masih dalam posisi sedang.

Kemudian kami laporkan juga bahwa, 10 provinsi dengan tingkat kegemaran membaca tertinggi dan terendah antara lain ini di; Aceh 6,5, 65,85, kemudian Sumatera Barat 66,87, Sumatera Selatan 61,52, Banten 65,70, DKI Jakarta 68,71, Jawa Tengah 70,96, Jawa Timur 68,4, Yogyakarta kategori sangat tinggi 72,29, Jawa Barat 70,10, kemudian Nusa Tenggara Barat 60,9

seterusnya, semakin ke timur semakin rendah sehingga bisa kelihatan di Papua Barat itu hanya 54,81 ini.

Ini sangat berkorelasi dengan infrastruktur, regulasi-regulasi, kebijakan-kebijakan, tenaga perpustakaan, anggaran perpustakaan, ruang-ruang belajar yang sangat terbatas.

Program Prioritas Nasional Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial. Kaitannya dengan 70% *transfer knowledge* di Perpustakaan Nasional, kami tidak bisa tidak melakukan kegiatan yang bisa mendukung untuk pembuktian program itu bisa dicapai dan kalau kita lihat pada program di halaman 40, komponen program transformasi perpustakaan itu ada 5; pengembangan kapasitas, membangun sinergi dengan *stakeholder* terutama pemerintah provinsi, kabupaten sampai ke tingkat desa, penyediaan *support* untuk peningkatan dan informasi melalui koleksi bahan pustaka, komputer dan internet, *monitoring* evaluasi publikasi maka bisa dilihat di sini tahapan di dalam program.

Pada kesempatan yang baik ini kami melaporkan kepada yang terhormat seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi X di halaman 41. Program transformasi perpustakaan kami mulai dengan pengembangan panduan, kemudian seleksi mitra, kemudian sosialisasi program, kemudian pembekalan *master trainer*, kemudian pembekalan fasilitator daerah, kemudian Bimtek SPP-TIK, kemudian *stakeholder* meeting nasional. Saya kira ini ada disaksikan oleh beberapa Ibu dan Bapak di kesempatan yang kami undang. Kemarin di Jawa Timur untuk *stakeholder meeting* di provinsi, kemudian *mentoring* dan dokumentasi dampak monev melalui sistem informasi manajemen, kemudian *peer learning meeting regional*, kemudian *peer learning meeting national*, kemudian publikasi program sampai dengan produk-produk.

Saya kira bisa ditampilkan produknya yang di Surabaya kemarin. Ada Mas Iwan? Ini bisa dilihat di sini produknya, lanjut. Jadi banyak diantara mereka yang tadinya betul-betul pengangguran tidak punya usaha, setelah terlibat dalam program ini, kami pandu selama kurang lebih 1 tahun dan kami akhiri dengan pertunjukan produk-produk.

Ini memang bukan mengambil program UMKM di koperasi dan ekonomi kreatif, tapi ini murni adalah meyakinkan betapa perubahan *mindset* itu bisa merubah ekonomi dan perilaku kehidupan masyarakat kita. Data-data di kita masih sangat banyak saya kira, tetapi itu yang bisa kami laporkan kepada yang terhormat Bapak-Ibu Pimpinan dan semua Anggota Komisi X DPR RI dan mitra Bappenas dan Kemendikbud, selanjutnya data ini nanti kami akan *share* baik *soft file* maupun tercetak.

Demikian yang kami laporkan dan kami kembalikan kepada Ibu Pimpinan sidang.

Terima kasih.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT :**

*Walaikumsalam warahmatullah wabarakatuh,*

Terima kasih kepada Pak Syarif Bando.

Selanjutnya, Bappenas dulu mungkin Pak ya. Kami berikan waktu kepada Pak Plt Deputy Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat Dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas, Bapak Dr. Ir. Subandi, M.Sc., beserta jajaran.

Silakan, Pak.

**PLT DEPUTI BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA, MASYARAKAT DAN KEBUDAYAAN KEMENTERIAN PPN / BAPPENAS (Dr. Ir. SUBANDI., M.Sc.):**

Terima kasih, Ibu Pimpinan.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*  
Selamat sore,  
Salam sejahtera untuk kita semua,

Yang kami hormati Ibu dan Bapak Pimpinan Komisi X dan Anggota Komisi X DPR RI,  
Yang saya hormati Kepala Perpustakaan Nasional,  
Yang saya hormati Kepala Badan Bahasa dan,  
Kepala Badan Standar dan Kurikulum dan,  
Bapak-Ibu hadirin,

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, jadi kami akan menyampaikan beberapa isu yang dipermintakan dari undangan yang sudah kami terima.

Jadi terkait dengan literasi ini merupakan salah satu aktivitas dalam pembangunan manusia, karena kita tahu bahwa terkait literasi ini pengukurannya, kita sebenarnya tadinya kalau Bapak-Ibu masih-masih ingat dulu waktu kita bicara literasi ini adalah kemampuan membaca. Jadi di BPS itu dan di IPM pada waktu mengukur IPM, kita mengukur IPM apa salah satunya adalah angka gitu ya. *Nah* sekarang bicara kita sudah pion dari melek aksara. Jadi bukan hanya membaca saja, tapi juga bagaimana dia bisa mampu anak-anak itu mampu mengolah dan memahami apa yang dia baca. Jadi ini arti dari apa literasi yang harus kita kembangkan.

*Nah* kalau kita lihat dari pencapaian hasil PISA, yaitu yang menjadi salah satu indikator dan target apakah kita kemampuan literasi anak-anak kita itu sudah sesuai atau belum. Itu kita mempunyai, bisa selanjutnya di halaman 3 mungkin.

Ya, jadi nilai dari kemampuan anak-anak kita untuk literasi, matematik dan sains yang diukur dengan Program For International Single Assessment (PISA), jadi ini capaian PISA kita ini menunjukkan perbaikan kalau kita lihat sampai 2018 sampai 2015, namun sampai 2018 hasilnya apa menunjukkan penurunan dan yang paling turun itu adalah nilai untuk literasi. Jadi ini apa memang cukup memprihatinkan gitu ya. Di mana tahun 2018 kemampuan literasi membaca ini mengalami penurunan yang sangat signifikan dibandingkan dengan tes lainnya, yaitu mencapai 26 poin dan menjadi capaian yang terendah selama 15 tahun sebelumnya. Jadi ini apa memang yang betul-betul harus apa kita perhatikan dan lebih dari 50% siswa Indonesia ini masih memiliki kemampuan literasi membaca matematika dan sains di bawah standar kompetensi minimum. Jadi apa ini yang nilainya 2 ke bawah ini masih apa, level 2 ke bawah ini masih 50% lebih gitu, jadi ini yang harus menjadi apa perhatian kita.

*Nah* kemudian apa terkait pencapaian nilai dari literasi kita, ini budaya literasi ini merupakan salah satu dari dimensi penyusunan indeks pembangunan kebudayaan. Jadi indeks pembangunan kebudayaan ini memang kami apa, pada waktu menyusun bersama dengan BPS dan desain kebudayaan ini meniru negara-negara lain apa saja sih komponennya begitu ya. Jadi ini acuannya apa belajar dari UNESCO dan literasi ini merupakan salah satu dimensi untuk penyusunan indeks pembangunan kebudayaan.

Jadi untuk literasi ini diukur melalui tiga indikator, yaitu kebiasaan membaca, mengakses informasi dan pengetahuan melalui internet dan mengunjungi perpustakaan ataupun memanfaatkan taman bacaan masyarakat. Jadi ini yang beberapa yang tadi beririsan dengan yang sedang disusun oleh Perpustakaan seperti yang disampaikan oleh Kepala Perpustakaan. Jadi ini yang nanti mungkin perlu kita apa kita cek metodenya, karena ini nanti harus juga diuji buktikan dan secara metodologi ini apa betul dan nanti tentunya kita harus mengundang BPS juga ini Pak, Pak Kepala terkait ini begitu ya. Karena survei itu ada pakemnya begitu ya, tidak menggunakan tadi responden yang sangat terbatas dan sangat persuasif, jadi pilih gitu respondennya. Jadi ini yang apa mungkin yang perlu kita cermati.

*Nah*, kalau kita lihat capaian indikator penyusunan dimensi budaya literasi tahun 2021 ini apa, 2018 sampai 2020 ini menunjukkan kenaikan, namun pada tahun 2021 capaian dimensi ini mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Dimensi budaya literasi pada tahun 2021 mengalami penurunan, ini disebabkan karena kalau kita lihat grafik apa gambar yang kiri paling bawah, ini dimensi apa yang menurun itu adalah kunjungan ke perpustakaan atau memanfaatkan taman bacaan masyarakat. Ini mungkin dikarenakan covid gitu ya, ini hanya 15% gitu dari penduduk itu ya. Sedangkan untuk penduduk yang membaca baik cetak maupun elektronik ini ada 73% dan penduduk yang mengunjungi, penduduk yang mengakses internet ini 74,8%. Jadi ini memang kunjungan perpustakaan.

**KETUA RAPAT:**

Bisa dikirim ke kita, Pak? Ini Pak bahannya Pak.

**PLT DEPUTI BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA, MASYARAKAT DAN KEBUDAYAAN KEMENTERIAN PPN / BAPPENAS (Dr. Ir. SUBANDI., MSc):**

Kami sudah mengirimkan Ibu tapi tidak mencetak, tadi apa panitia meminta *softcopy*, Ibu. Kemarin kami kirim, mohon maaf.

**KETUA RAPAT :**

*Monggo* Pak, diteruskan Pak.

**PLT DEPUTI BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA, MASYARAKAT DAN KEBUDAYAAN KEMENTERIAN PPN / BAPPENAS (Dr. Ir. SUBANDI., MSc):**

Terima kasih, Ibu.

Jadi ini yang apa menjadi *concern* terkait upaya untuk meningkatkan literasi tadi, ini memang banyak komponen yang mempengaruhi dan ini nanti kalau kita *match*-kan dengan apa yang di apa sedang disusun oleh Perpunas ini mungkin kami kami duduk bersama. Namun demikian ini yang sudah ada di dalam RPJMN Ibu. Jadi kami menggunakan komponen ini yang merupakan komponen dari indeks pembangunan kebudayaan dan ini yang sudah di apa dilakukan oleh UNESCO.

*Nah*, kemudian terkait apa literasi ini, kami menganggap penting dalam konteks pembangunan manusia. Jadi ada tiga pilar untuk pembangunan manusia, menjadikan manusia unggul di dalam RPJMN. Yang pertama adalah memenuhi kebutuhan dasar dari manusia, dari seluruh penduduk kita yaitu pendidikan, kesehatan di sini. Jadi ini dua isu dan juga perlindungan sosial bagi seluruh penduduk kita, dan kemudian setelah terpenuhi kebutuhan dasarnya ini dia harus menjadi penduduk yang produktif. Jadi di sini untuk manusia yang di, yang harus dikembangkan adalah pendidikan dan keterampilan vokasi, kemudian apa pendidikan tinggi yang berkualitas dan relevan dan juga ilmu pengetahuan dan apa riset dan inovasi. Jadi ini untuk komponen dari produktivitas manusia.

Dan yang terakhir adalah dalam rangka membangun karakter, jadi di sini penguatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas, ini merupakan salah satu dari upaya kita membangun karakter dari apa manusia kita gitu ya dan arah kebijakannya adalah dalam rangka meningkatkan budaya literasi, inovasi dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan dan berkarakter. Dan yang pertama adalah upaya kita strateginya meningkatkan budaya literasi, ini mencakup pengembangan budaya kegemaran membaca, pengembangan sistem perbukuan dan penguatan konten literasi dan peningkatan akses dan kualitas perpustakaan berbasis inklusi sosial.

#

Jadi yang terakhir ini yang sedang dikembangkan perpustakaan dan hasilnya menurut kami sangat bagus, jadi kontekstual. Jadi literasi ini perpustakaan itu bukan hanya tempat deposit buku, tapi betul-betul digunakan, dimanfaatkan oleh masyarakat pengguna dan bisa menjadi diwujudkan dalam nilai ekonomi. Jadi ini yang apa literasi berbasis inklusi sosial. Jadi ini praktek-prakteknya, kami melihat di banyak perpustakaan yang dibangun oleh Perpunas ini betul-betul apa pion dari hanya kegemaran membaca.

Jadi hasil dari kegemaran membaca ini adalah bagaimana ini menjadi pengetahuan dan itu menjadi modal mereka untuk membangun usaha. Jadi ini sangat bagus dan ini tentunya di tingkat lapangan yang bekerja bukan hanya Perpunas, Perpunas sebagai apa penggerak, penyedia bahan pengetahuannya dan apa tentunya, Kementerian lain ini juga harus menyambut. Jadi di daerah ini SKPD untuk industri, perdagangan dan lain-lainnya terkait misalnya apa dari membaca dia bisa peternak lele dengan baik misalnya.

*Nah*, dari peternak lele yang baik bagaimana menjualnya, bagaimana mengemasnya, ini kan harus dari SKPD lain. Jadi ini kami betul-betul mewanti-wanti Perpunas untuk tidak mengalokasikan pendanaan ke situ. Jadi ya nanti Kementerian lain ini sudah ada porsinya masing-masing. Jadi ini apa upaya untuk membangun literasi ini yang pion membaca saja, itu yang sudah dilakukan oleh Perpustakaan Nasional.

Kemudian yang kedua adalah pengembangan pembinaan dan perlindungan bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra. Jadi ini yang tadi yang disampaikan oleh Ibu Pimpinan ini sangat-sangat relevan. Jadi kami juga mendorong bagaimana Badan Bahasa ini, juga menjadi basis pada waktu mengembangkan apa gemar membaca tadi di sekolah dan ini apa yang dikembangkan tentunya kemampuan bahasanya oleh badan bahasa dan harus nyekrup dengan Dirjen PAUD Dikdasmen, jadi *nggak* jalan sendiri-sendiri.

Kalau Bapak, Bapak-Ibu zaman dulu itu jalan sendiri-sendiri Pak jalannya nih, *nah* sekarang ini yang Pak Kepala Badan Bahasa sudah bagaimana kalau badan bahasa ini. Karena ngomong literasi kemampuan bahasa anak kita ini sangat menguasai gitu. *Nah* kami juga memperkenalkan di dalam RPJMN literasi kelas awal ya Pak ya.

Jadi kalau misalnya anak Papua tiba-tiba diajari membaca dengan bahasa Indonesia, misalnya di dalam bacaan; ada Budi diantar ayahnya naik mobil ke sekolah misalnya. Mereka mobil aja *enggak* tau, *nggak* bisa bayangin kayak apa yang di daerah pedalaman gitu ya. *Nah* ini jadi *nggak* kontekstual.

Jadi, kenapa tidak menggunakan bahasa daerah untuk di kelas awal tadi, sehingga anak-anak mampu membaca dan bisa membayangkan dan memahami dan ini yang sudah dilakukan oleh Badan Bahasa, banyak sekali cerita-cerita daerah di situ yang bagus-bagus. Ini sudah jadi buku, itu digunakan *nggak* oleh Dikdasmen, ya itu pertanyaan kami. Jadi, dan itu bisa *nggak* dicetak dan menjadi apa perpustakaan.



Karena kalau kita lihat ini memang sebelum pandemi kami berkunjung ke sekolah ini, Pak Anindito. Jadi di sekolah itu yang ada adalah bacaan buku-buku teks untuk pelajaran dan itu masih di-seal/ plastik biasanya. Jadi perpustakaan ini memang *nggak* jalan dan *nggak* ada buku-buku pengayaan gitu ya, dan untuk sekolah-sekolah bagus ada gitu ya, tapi kalau di daerah-daerah apa yang agak *remote* gitu ini ya yang kurang. Sehingga ini yang apa menurut kami standar dari apa koleksi dari perpustakaan di sekolah ini yang harus memang bersinergi dengan Perpustakaan Nasional dan Badan Bahasa apa saja sih yang harus ada. Sehingga nanti pengadaan buku di BOS yang sudah kita siapkan anggarannya yang sudah disetujui oleh Bapak-Ibu DPR tentunya ini bisa di apa digunakan juga untuk membeli buku-buku tadi gitu.

Jadi ini yang sangat-sangat diperlukan oleh anak-anak kita, jadi bukan hanya di masyarakat tapi juga di sekolah. Jadi ini yang program-program yang ada di RPJMN sebelumnya mengarah ke sana.

Kemudian, pengembangan budaya itu inovasi, kreativitas dan daya cipta dan penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi. Jadi di sini mencakup pengembangan mitra perpustakaan, pengembangan inovasi sosial yang didukung oleh pendanaan filantropi. Jadi Bapak-Ibu apa untuk filantropi ini sebetulnya mereka, karena kami mempunyai platform SDGS, banyak filantropi dari swasta itu tanya. Sebetulnya kalau kami ingin ikut membantu program pemerintah itu gimana sih, apa saja sih. Jadi ini melalui SDGS Bapak, jadi ini yang bisa eh apa digunakan untuk membangun tadi literasi berbasis industri sosial dan ini sudah dilakukan oleh Perpustakaan dengan bekerja sama dengan Coca-Cola. Jadi ini hasilnya sangat bagus Pak ya, Pak, Pak Perpustakaan, jadi itu.

Kemudian, bagaimana sinerginya intervensi pembangunan apa perpustakaan dan literasi. Jadi ini bagaimana kalau di Kemendikbud itu Badan Bahasa nanti nyambung dengan badan standar dan kurikulum dan juga penggunaannya itu adalah Dirjen Dikdasmen, tapi kemudian bagaimana sinergi antara Kemdikbud yang didalamnya itu ada tiga institusi ini dengan Perpustakaan.

Jadi ini yang apa tadi disampaikan oleh Ibu Pimpinan, ini sangat bagus dan kami betul-betul sangat mendukung kalau itu terjadi, sehingga *nggak* jalan sendiri-sendiri gitu karena ini *resources*-nya tersedia. Walaupun tanda kutip *resources*-nya bisa cukup bisa kurang gitu dan akhirnya ini, ini harus kita sinergikan dan hasilnya pasti akan lebih bagus gitu.

Jadi kira-kira itu, kemudian Perpustakaan tentunya didukung berapa tahun terakhir ini dengan dana DAK, ini yang nanti tentunya harus diikuti bagaimana BOS ini bisa mencukupi untuk mengisi perpustakaan. Karena menu BOS ini juga bisa untuk membangun ruang perpustakaan dan juga untuk koleksinya, jadi begitu. Jadi ini yang nanti apa, jika ini bisa di apa sinergikan dengan Perpustakaan mungkin akan-akan lebih bagus gitu ya dan ini kalau di lapangan tidak ada pengkotak-kotakan. Ini tentunya saya yakin ini literasi dan akan semakin bagus untuk masyarakat dan untuk anak-anak kita di sekolah.

Saya kira dari kami begitu Ibu dan Bapak, terima kasih sekali nanti jika diperlukan pendalaman kami akan menyampaikan dan kami di sini hadir bersama Direktur pendidikan Ibu dan agama, Bapak Dr. Abdul Fahmi. Jadi beliau ini yang lebih paham Bu secara detail. Jadi nanti akan apa kami bersama-sama jika ada pertanyaan dari Ibu dan Bapak.

Terima kasih.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT :**

*Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,*

Saya mohon maaf tadi terlewat karena beserta jajaran ternyata ada satu Direktur Agama, Pendidikan dan Kebudayaan dari Bappenas Bapak Dr. Amih Al Humami, M.A., M.Ed., Ph.D. Wah ini gelarnya juga banyak ini, Pak Nino. Dari ujung ya, ya. Pak Fikri udah hafal.

Baik, sepertinya memang kalau membaca dua paparan yang pertama ini memang ada *missing link* ya, seperti struktur perpustakaan di sekolah itu ada apa *nggak* sih? Karena selama kita ada di dalam pembahasan guru PPPK kalau *nggak* salah itu tenaga perpustakaan tidak diusulkan ya, tidak diusulkan. Jadi siapa yang mengelola perpustakaan di sekolah? Itu juga menjadi pertanyaan besar buat kita. Sementara Bappenas meyakini bahwa cara-cara yang dilakukan untuk meningkatkan indeks literasi itu sudah cukup bagus, tapi perpustakaan di sekolah *enggak* ada yang ngurusin.

Mungkin dengan bantuan Bapenas pada periode berikutnya jika ada kesempatan untuk apa namanya ya, membuat struktur sekolah atau menambahkan pegawai begitu perpustakaan memiliki slot pustakawan, di sekolah memiliki slot yang harusnya cukup besar karena kebutuhannya sangat besar.

Selanjutnya, apakah Bapak Amih Al Humami memiliki paparan juga? Cukup. Kita berikan kesempatan Pak, Pak Nino dulu *monggo*, Kepala Badan Standar Kurikulum dan *Assesment* Pendidikan Kemendikbudristek RI.

Silakan.

**KEPALA BADAN STANDAR KURIKULUM DAN ASESMEN PENDIDIKAN KEMENDIKBUDRISTEK RI (ANINDITO ADITOMO, S.Psi., M.Phil., Ph.D.):**

Terima kasih, Bu Pimpinan.

Yang terhormat para Wakil Ketua dan,  
Anggota Komisi X,  
Rekan-rekan kita dari Perpusnas,  
Kepala Perpusnas,  
Deputi Bappenas,

Rekan-rekan dari Kemendikbudristek sekalian,

Selamat sore,  
*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*  
Salam sejahtera untuk kita semuanya,

Terima kasih atas kesempatannya, ini undangan dan kesempatan yang sangat baik untuk menyampaikan kebijakan dan program kami di Kemendikbudristek terkait dengan penguatan budaya literasi, utamanya di persekolahan. Mohon bisa ditampilkan tayangan dari BSKAP.

Pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa sepakat sekali literasi merupakan tema yang sangat penting dan ini menjadi salah satu fokus perhatian kami di Kemendikbudristek. Jadi dalam kerangka kebijakan Merdeka Belajar literasi dalam makna yang luas seperti didefinisikan oleh UNESCO.

Berikutnya, Mas.

Literasi dalam makna yang luas, tadi sudah disampaikan juga oleh Kepala Perpustakaan itu bukan hanya soal bisa membaca, bisa menulis dan berhitung ya, tetapi literasi merupakan kemampuan untuk memahami, menafsirkan dan juga menciptakan dan mengkomunikasikan informasi dalam berbagai bentuknya. Jadi bukan hanya membaca, menulis, tapi juga mencakup daya nalar dan kreativitas.

*Nah*, dalam kerangka kebijakan Kemendikbudristek, literasi dalam makna luas ini tercermin dalam rumusan apa yang kita sebut sebagai profil pelajar Pancasila sebagai pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, perilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Dalam regulasi rumusan ini ditetapkan sebagai standar kompetensi lulusan dalam Permendikbud Nomor 5 Tahun 2022 dan Permendikbud SKL (Standar Kompetensi Lulusan) ini menjadi acuan bagi semua standar pendidikan yang lainnya dan karena itu juga menjadi landasan bagi berbagai program dan kebijakan Kemendikbudristek.

Di *slide* berikutnya,

Ini rumusan standar kompetensi rumusannya seperti ini, Bapak dan Ibu. Jadi ada 8 *domain* karakter dan kompetensi yang esensial dalam sebagai pelajar sepanjang hayat untuk seseorang itu bisa berpartisipasi dalam masyarakat yang modern, demokratis dan majemuk.

Jadi ada karakter-karakter yang sifatnya landaskan *values* ya nilai, iman, takwa, akhlak, mulia, kebhinekaan dan nasionalisme, gotong royong, kemandirian, ada juga kompetensi yang sifatnya sangat dekat dengan literasi dalam arti luas tadi, nalar kritis dan kreativitas. *Nah*, ini ditambah dengan dua kecakapan yang spesifik mengacu pada literasi, satu literasi berbahasa dan yang kedua literasi matematika.

Literasi bahasa kita definisikan sebagai kemampuan dan kegemaran. Tadi Bapak Kepala Perpustakaan dan Pak Bandi juga menyampaikan bahwa, literasi itu juga urusan afektif gitu ya, bukan hanya kognitif tetapi kesukaan membaca untuk kesenangan. Ini tercakup juga dalam definisi kita tentang literasi bahasa dalam Standar Kompetensi Lulusan.

Kemudian di *slide* berikutnya,

Ini yang akan saya paparkan di kesempatan kali ini. Ada tiga, selain standar ya, ada 3 program yang menjadi portofolio BSKAP yang mengacu kepada standar kompetensi lulusan tadi. Jadi 8 karakter dan kompetensi dalam SKL itu menjadi tujuan bagi hampir semua program dan kebijakan prioritas Kemendikbudristek.

Pertama, kalau di BSKP rumusan standar nasional pendidikan lainnya, standar isi, standar proses pembelajaran, standar penilaian, standar tentang guru dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, tata kelola dan pembiayaan itu dirumuskan dengan tujuan untuk mendukung terwujudnya karakter dan kompetensi yang ada di dalam standar kompetensi lulusan ini, pilar-pilar Pancasila ini.

4, lebih tepatnya 5 karena tadi malam baru saja terbit satu lagi, lima standar pendidikan itu sudah disahkan, tiga yang lainnya sedang dalam proses finalisasi.

Selain penyusunan standar, kita juga mengubah bagaimana pemerintah ini mengevaluasi, mengukur kinerja satuan pendidikan dan pemda. Kalau tadinya lebih berorientasi pada faktor-faktor yang gampang diukur, *input base* berapa jumlah guru, berapa luas bangunan, kualitas sarana prasarana. Sekarang ukurannya betul-betul diarahkan pada apakah satuan pendidikan dan Pemda itu hasil menciptakan lingkungan belajar yang mewujudkan standar kompetensi lulusan karakter dan kompetensi yang 8 in.

Selain soal evaluasi dan penjaminan mutu, kita juga sedang mereformasi kurikulum dan pembelajaran. Jadi kita sedang mengubah kerangka kurikulum nasionalnya agar lebih mendorong pembelajaran yang mendalam untuk pengembangan karakter dan kompetensi dalam SKL tadi.

Kalau evaluasi dan penjaminan mutu tadi program spesifiknya ada asesmen nasional, ada faktor pendidikan dan akreditasi, di ranah kurikulum dan pembelajaran program-programnya adalah kurikulum Merdeka, kemudian sekolah penggerak dan SMKTK sebagai upaya untuk melatih guru-guru di sekolah-sekolah yang akan menjadi rujukan atau pusat belajar bagi sekolah-sekolah yang lain dan *platform* Merdeka Belajar.

Ranah terakhir yang ada di BSKP adalah perbukuan. Kita merancang regulasi-regulasi untuk mendorong tersedianya buku teks dan buku bacaan yang memantik minat baca murid. Yang dikerjakan BSKP di bawah Pusat Perbukuan, kita utamanya menyusun buku-buku teks yang baru selain regulasinya, sedangkan buku bacaannya nanti Prof. Amin akan menyampaikan

satu program yang secara spesifik menyediakan buku-buku bacaan di seluruh. Jadi banyak sekali satuan pendidikan di Indonesia, ini seharusnya nanti menjawab pertanyaan dari Pak Bandi tadi ya.

Berikutnya, *next*.

Terkait dengan evaluasi dan penjaminan mutu, Bapak dan Ibu. Salah satu program utama Kemendikbudristek adalah melakukan asesmen nasional, ini menjadi alat kita untuk mengukur kinerja satuan pendidikan dan pemda di seluruh Indonesia dan ukurannya sekali lagi itu tentang kualitas pembelajaran dan hasil belajar murid. Jadi kalau tadi Bu Agustina menyampaikan bahwa, kita perlu apa regulasi yang mendorong kepala sekolah gitu ya untuk memperhatikan perpustakaan dan literasi.

Cara Kemendikbudristek supaya kepala sekolah itu memperhatikan literasi yang utama adalah dengan menjadikan literasi siswanya sebagai ukuran kinerja kepala sekolah. Jadi ke depannya akreditasi misalnya itu ukurannya adalah apakah sebuah sekolah bisa meningkatkan jumlah siswa yang punya literasi membaca yang baik di sekolahnya dari tahun ke tahun. Jadi dengan demikian seharusnya mulai dari tahun ini ke depannya, literasi ini akan menjadi prioritas yang sangat tinggi bagi sebuah kepala sekolah dan kepala daerah.

Kepala daerah pun begitu, standar pelayanan minimum jadi indeks SPM yang digunakan untuk mengukur kinerja pemda berasal dari asesmen nasional juga, utamanya dari tes literasi dan numerasi yang kita lakukan di asesmen nasional. Jadi kepala daerah yang berhasil, yang SPM-nya baik adalah yang dari tahun ke tahun jumlah siswa yang bisa membaca di daerah dia itu meningkat, meningkat terus. *Nah* seharusnya dengan indikator itu hasil belajar siswa, khususnya literasi membaca dan literasi matematika, itu akan menjadi prioritas tinggi bagi kepala daerah juga mulai tahun ini.

Asesmen nasional juga mengukur karakter dan kompetensi dalam profil belajar Pancasila tadi, juga kualitas lingkungan belajar yang kita percayai itu menjadi syarat bagi terciptanya, berkembangnya literasi dan numerasi siswa. Jadi ada kualitas pembelajaran, iklim keamanan di sekolah dan iklim kebhinekaan dan inklusivitas.

Iklim keamanan ini mengukur, apakah sebuah sekolah itu aman dari perundungan, aman dari kekerasan fisik, kekerasan seksual, aman dari narkoba juga dan zat-zat adiktif lainnya. Iklim kebhinekaan dan inklusivitas itu mengukur apakah anak-anak dan warga sekolah itu merasa diterima di sekolah, tidak di diskriminasi, tidak dikucilkan karena perbedaan ras, agama, budaya dan latar belakang sosial ekonomi atau kemampuannya. Itu yang diukur di asesmen nasional ya.

Jadi di halaman berikutnya, ini dengan asesmen nasional sebenarnya kita sudah bisa memetakan sampai dengan tingkat satuan pendidikan. Kita bisa memetakan kualitas pendidikan kita misalnya dalam peta ini yang ditampilkan adalah berapa persen siswa di sebuah sekolah dan daerah yang bisa

membaca, memahami bacaan. Ya bukan sekedar menyuarakan tetapi bisa memahami dan mengevaluasi bacaan dengan baik dan peta ini sudah kita gunakan untuk perencanaan dan rancangan berbagai program peningkatan literasi.

Ada program-program seperti kampus mengajar, di mana ada puluhan ribu mahasiswa yang kita kirim untuk menjadi pendamping, penguat budaya literasi di sekolah, di seluruh Indonesia bagian dari MBKM, itu pemilihan sekolah yang dituju didasarkan pada hasil asesmen nasional. Sekolah-sekolah yang paling jelek tingkat literasinya itulah yang menjadi prioritas sasaran programnya. Demikian juga dengan program bacaan bermutu untuk PAUD dan SD di daerah-daerah yang akses dan fasilitas sulit yang akan dipaparkan oleh kami nanti.

Di halaman berikutnya,

Kita ini menunjukkan bagaimana cara Kemendikbudristek menyampaikan hasil asesmen nasional tadi kepada setiap kepala sekolah dan pemerintah daerah dan dinas pendidikan. Jadi caranya adalah dengan melalui platform digital yang namanya platform lapor pendidikan. Jadi sekarang ini dinas pendidikan pemda sekolah itu punya akun belajar.id yang bisa mereka gunakan untuk login dan melihat berapa persen siswa di sekolah saya, berapa persen siswa di daerah saya yang sudah bisa membaca dengan level minimum yang ditetapkan oleh Kemendikbudristek. Berapa persen sekolah di daerah saya yang mengalami masalah perundungan, berapa persen sekolah di daerah saya yang mengalami masalah kekerasan seksual dan seterusnya.

Ini kita sampaikan sebagai umpan balik dan bahan perencanaan berbasis data bagi sekolah dan pemda, sudah sekitar 70% dari satuan pendidikan di seluruh Indonesia, termasuk 40% dari daerah 3T. Jadi sekolah-sekolah di daerah 3T pun sudah cukup banyak yang, bukan hanya mengakses tapi mengeksplorasi dan mengunggah data dari platform-platform pendidikan ini. Kalau untuk pemda praktis sudah semua pemda memanfaatkan platform ini dengan pendampingan dari UPT Dirjen PAUD Dikdasmen ya.

Kemudian, selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan bagaimana Kurikulum Merdeka itu mendukung agenda penguatan literasi ini. Kurikulum Merdeka itu salah satu fokusnya adalah untuk pengembangan literasi sebagai kompetensi dasar. Karena Kurikulum Merdeka disusun untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila dalam standar kompetensi rumusan tadi yang memiliki fokus kuat pada literasi.

*Nah* bagaimana, apa bedanya gitu ya Kurikulum Merdeka dibandingkan kurikulum sebelumnya. Ada dua perbedaan utama yang relevan untuk diskusi kita, yang pertama adalah Kurikulum Merdeka itu materinya kita kurangi. Jadi materi akademik yang diwajibkan dari pusat itu lebih sedikit, sehingga guru punya lebih banyak waktu untuk pendalaman, untuk pembelajaran yang lebih mendalam. Jadi pengembangan literasi, daya nalar itu tidak bisa dilakukan kalau guru terburu-buru menyampaikan materi karena materi yang diwajibkan dari pusat terlalu banyak.

Karakteristik kedua yang relevan adalah bahwa yang Kurikulum Merdeka memberi fleksibilitas yang luar biasa bagi satuan pendidikan untuk menyesuaikan bagaimana pembelajaran itu dilakukan di tingkat sekolah. Jadi kami sudah cukup sering berkeliling ke sekolah-sekolah di NTB, NTB, Kaltara, sekolah-sekolah yang akses dan fasilitasnya itu terbatas. Mereka sangat terbantu karena adanya Kurikulum Merdeka yang memungkinkan mereka memfokuskan pembelajaran, misalnya 1-2 bulan atau bahkan satu semester pertama untuk remedial literasi membaca anak didiknya misalnya. Itu sangat dimungkinkan di Kurikulum Merdeka karena kita tidak mengunci lagi jam pelajaran perminggunya. Jadi sekolah sangat bisa menetapkan satu bulan pertama itu khusus untuk remedial literasi membaca misalnya. Kalau memang mereka melayani anak didik yang di rumah belum pernah kenal buku, di rumah belum pernah bisa diajari membaca oleh orang tuanya.

Jadi karakteristik itu yang membuat Kurikulum Merdeka akan menciptakan *demand* terhadap buku-buku bacaan.

Di halaman berikutnya ini perbandingan antara materi dan tujuan pembelajaran di K13 yang sebelah kiri dengan Kurikulum Merdeka. Bisa dilihat dari jumlah apa poin-poinnya saja itu ada pengurangan yang sangat signifikan. Dari puluhan menjadi hanya 4 poin kompetensi dan materi yang ada di Kurikulum Merdeka dan ini difokuskan pada keterampilan berbahasa yang esensial, menyimak, membaca pemirsa, menyampaikan gagasan ya, berbicara dan presentasi, serta menulis. Karena materinya kita pangkas, sekali lagi guru akan bisa fokus pada pengembangan kompetensi literasi yang lebih esensial.

Di halaman berikutnya, kita sudah punya bukti yang menunjukkan bahwa pengurangan materi itu sangat efektif. Jadi ketika pandemi kita memangkas materinya, ada sekitar 30% satuan pendidikan yang selama pandemi itu menerapkan kurikulum yang kita sinergikan, materinya kita pangkas dan setelah satu tahun kita ukur, kita bandingkan hasil belajarnya. Dibandingkan dengan sekolah yang menerapkan kurikulum secara penuh, kurikulum yang lebih sederhana ini, *learning loss*-nya tetap terjadi, tapi besarnya *learning loss* itu hanya seperlima dari *learning loss* yang terjadi di sekolah-sekolah yang menerapkan kurikulum secara penuh. Jadi ini data yang sangat kuat menunjukkan pentingnya kita mengurangi materi yang kita wajibkan dari pusat.

Berikutnya, ini contoh praktik pembelajaran yang apa namanya dilandaskan pada prinsip Kurikulum Merdeka, di mana sekolah itu pertamanya memetakan dahulu tingkat kemampuan membaca peserta didiknya dan kalau ini dilakukan secara sistematis banyak guru dan sekolah itu yang terkejut. Ternyata siswa kelas 4 kelas 5 bahkan kelas 6 itu masih ada yang belum bisa membaca, jangankan memahami bacaannya tetapi menyuarakan kalimat secara utuh secara lancar pun belum bisa itu ya.

*Nah*, pemetaan seperti ini yang kita dorong melalui Kurikulum Merdeka dan ini sudah diterapkan di banyak sekolah termasuk sekolah-sekolah yang fasilitasnya terbatas.

Di halaman berikutnya, Kurikulum Merdeka memang belum diterapkan secara nasional, karena kita memiliki tahapan-tahapan yang cukup panjang. Dikembangkan sejak tahun 2020, kita menerapkan secara terbatas di tahun 2021 hanya di 3000-an sekolah, tahun 2022 dan tahun ini, kita terapkan secara sukarela di satuan pendidikan yang ingin menerapkannya sebelum tahun depan rencananya kita terapkan secara nasional secara bertahap juga.

Informasi lengkap tentang kurikulum ada di website resmi kurikulum [kurikulum.kemdikbud.go.id](http://kurikulum.kemdikbud.go.id) dan sedangkan materi pelatihan dan perangkat-perangkat ajarnya yang untuk digunakan guru dalam menerapkan Kurikulum Merdeka itu kami sediakan melalui platform merdeka mengajar. Ini platform yang sudah digunakan oleh 2 juta guru lebih juga di seluruh Indonesia.

Berikutnya, terakhir saya ingin menyampaikan mengenai kebijakan pembukuan. Tentu saja kita bisa mendorong anak-anak dan guru untuk senang membaca, tapi kalau tidak ada buku yang bagus untuk dibaca ya keinginan kita tidak akan bisa tercapai. Karena itu, penguatan budaya literasi perlu didukung kebijakan perbukuan yang mendorong adanya ekosistem yang bisa menyediakan buku-buku bermutu yang terjangkau di seluruh Indonesia. Jumlah judul buku kita memang meningkat, tapi kita masih harus mengakui bahwa kualitas dan distribusinya masih menjadi kendala.

*Nah*, di pusat perbukuan kita mengidentifikasi beberapa tantangan dan yang ingin kita pecahkan salah satunya melalui kebijakan perbukuan ya. Kita ingin agar budaya membaca dan menulis itu meningkat, salah satu yang harus kita lakukan adalah satu tadi menyediakan buku-bukunya itu sendiri. Jadi bagaimana caranya agar sekolah-sekolah kita dibanjiri oleh buku-buku yang ingin dibaca oleh anak-anak, buku-buku yang bukan keinginan orang dewasa tetapi buku-buku yang memantik minat anak untuk membaca.

Kita juga perlu melakukan pengembangan kapasitas pelaku perbukumannya dan secara umum membangun ekosistem perbukuan yang lebih sehat.

Untuk itu di halaman berikutnya, kami sudah mengembangkan beberapa regulasi baru tentang standar mutu buku, standar proses, kaidah pemerolehan naskah, serta proses dan kaidah penerbitan buku. Kita juga sudah memperbarui regulasi tentang penilaian buku pendidikan dan perizinan usaha bagi penerbitan buku. Ada juga pedoman bagi penerbit dan penulis tentang buku-buku berjenjang yang memudahkan penulis dan penerbit untuk menyediakan buku-buku sesuai dengan tingkat kemampuan membaca, membacanya.

Ini kita gunakan kalau di perbukuan, pusat perbukuan untuk melakukan kegiatan penilaian buku, penyusunan buku terutama buku teks dan juga pembinaan pelaku perbukuan.

Beberapa *slide* selanjutnya saya hanya ingin menunjukkan contoh-contoh buku teks yang sudah kita kembangkan untuk Kurikulum Merdeka. Jadi Bapak dan Ibu kalau sempat bisa melihat di websitenya pusat perbukuan ya,



buku.kemdikbud.go.id. Buku-buku teks yang sekarang sudah jauh berbeda, jauh lebih menarik dari sisi visual maupun kontennya. Jadi kita menyusun buku teks Kurikulum Merdeka itu berdasarkan tingkat kemampuan membaca anak dan ini terutama penting bagi anak-anak di kelas 1, 2, 3 SD.

Kalau Bapak-Ibu perhatikan buku-buku teksnya kurikulum sebelumnya sejak kelas 1 pun itu sudah meminta anak-anak untuk bisa membaca kalimat yang panjang-panjang seolah-olah mereka sudah bisa membaca. *Nah* itu yang kita perbaiki di buku-buku teks Kurikulum Merdeka, tidak ada asumsi bahwa anak-anak sudah bisa membaca. Jadi lebih banyak visualnya, lebih banyak ilustrasi yang menggugah dan ini dikerjakan oleh ilustrator-ilustrator terbaik yang ada di Indonesia.

Di halaman berikutnya, ini kita eksplisitkan dalam buku panduan guru ya. Jadi di kelas 1 Bapak-Ibu guru itu diharapkan membacakan cerita bukan menuntut anak-anak sudah bisa membaca. Di halaman-halaman berikutnya ini contoh cerita-cerita yang ada di buku teks bahasa Indonesia kita.

Saya rasa itu dari saya Bu Pimpinan sidang. Terima kasih atas perhatiannya, mungkin bisa dilanjutkan oleh Prof. Amin untuk menyampaikan program yang lebih spesifik terkait buku bacaan.

Terima kasih.

Selamat sore,  
*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT :**

*Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,*

*Monggo langsung saja, Prof.*

**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA INDONESIA KEMENDIKBUDRISTEK RI (Prof. H. ENDANG AMINUDIN AZIZ, M. A., Ph. D.):**

Baik.

*Bismillahirrahmanirrahim,  
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Yang terhormat Pimpinan sidang,  
Pak Wakil Ketua Komisi,  
Para Anggota Dewan yang saya hormati,  
Para mitra dari Perpusnas,  
Pak Kepala kemudian,  
Pak Plt Deputi dari Bappenas dan,  
Direktur,  
Kepala BSKP dan,

Seluruh jajaran dari Kemendikbudristek yang saya hormati,  
Saya banggakan,

Terima kasih ini kesempatan yang saya pikir baik sekali ya untuk sekaligus kita melihat di sisi mana kita sebetulnya sudah apa saling bekerja sama dan di sisi mana kita masih perlu melakukan penguatan-penguatan terkait dengan program literasi nasional ini.

*Nah*, tadi dua mitra kita ya dari Perpunas dan dari Bappenas sudah menyampaikan kerangka besar literasi dan Mas Nino barusan menyampaikan apa yang kami garap di Kemendikbudristek.

Saya akan menyampaikan apa yang apa dilakukan agenda literasi pada tahun setidaknya 2 tahun terakhir ini dan ke depan sebagai respons dari persoalan-persoalan yang tadi dikemukakan ya, mudah-mudahan ada beberapa jawaban yang bisa memberikan kejelasan terhadap persoalan itu.

Empat pokok bahasan, tapi saya akan lewat saja yang pertama ini regulasinya sudah jelas terkait dengan apa regulasi kebahasaan kita, terus dilanjut saja. Ini semua sudah ada dari mulai Undang-Undang Dasar sampai ke Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, itu sudah ada terkait dengan urusan literasi secara garis besar.

Terus ini lewat saja, terus, terus, ini kita lewat, *nah* ini, berikutnya program prioritas Badan Bahasa.

Ya ini salah satu dari tiga program prioritas badan bahasa ini adalah literasi kebahasaan dan kesastraan dan di sini kami fokus kepada yang pertama penyediaan bahan bacaan untuk jenjang PAUD dan sekolah dasar untuk menunjang program gerakan literasi nasional.

*Nah*, kemudian yang kedua penyediaan video pembelajaran literasi yang apa kami kerjakan bersama di apa Kemendikbudristek ini, kerjasama dengan unit-unit utama lain ya terutama dengan Ditjen Vokasi, kemudian dengan SMK dan Politeknik.

Kemudian yang ketiga, pengembangan produk pembakuan dan modifikasi bahasa Indonesia ini juga sekaligus me apa menjawab apa yang tadi disampaikan oleh Subandi terkait dengan peningkatan kompetensi berbahasa Indonesia.

Lalu, pembinaan bahasa di lembaga pemerintahan dan non pemerintah ini untuk meningkatkan kualitas berbahasa mereka. Kemudian ada perluasan penggunaan UKBI (Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia), ini terkait juga dengan tingkat literasi yang apa mengukur kemampuan para pengguna bahasa Indonesia secara khusus begitu.

*Nah*, kemudian program yang kedua itu adalah perlindungan bahasa dan sastra Indonesia dan juga sastra daerah. *Nah*, ini kami kerjakan ya dengan fokus kepada revitalisasi dan tadi sebelum masuk ke ruangan ini, saya

sampaikan kepada Pak Bandi bahwa sejak tadi malam kami sedang menyelenggarakan program festival tunas bahasa ibu yang merupakan rangkaian dari kegiatan revitalisasi bahasa untuk 39 bahasa daerah pada tahun lalu dan tahun ini kita akan menyelenggarakannya dengan 59 bahasa daerah di 22 UPT yang melibatkan apa 22 provinsinya, jadi 19 UPT di 22 provinsi. *Nah* tahun yang lalu kita baru menyelenggarakan di 13 provinsi.

*Nah* kemudian *slide*, *slide* berikutnya, capaian program literasi, terus. Ini saya tidak akan ungkapkan ya karena ini hanya teoretis saja ya apa manfaat dari program literasi itu ya, penguatan kesejahteraan itu akan berkontribusi seperti apa, ini juga bisa dilewat terus.

*Nah*, ini adalah program yang tadi disampaikan oleh Mas Nino ya. Kami menyediakan buku-buku bacaan bermutu karena memang kami meyakini prinsip-prinsip ini. Ya bahwa buku itu menawarkan sebuah peluang yang sangat baik, yang sangat kaya untuk siapapun yang mau membuka jendela pengetahuan itu dan akses kepada buku tentu saja akan harus diperbanyak begitu.

*Nah* oleh karena itu, kami di Kemendikbudristek membuat program yang betul-betul terintegrasi tidak seperti yang tadi sampaikan juga kekhawatiran oleh Pak Bandi ya masing-masing saja Badan Bahasa sendiri, PAUD Dikdasmen sendiri, Ditjen GTK sendiri gitu, BSKP sendiri. Ini tidak lagi terjadi saat ini, karena sejak tahun yang lalu gitu ya kita sudah membuat program yang betul-betul terintegrasi dari mulai pekerjaan apa menyediakan buku, kemudian menilai buku, mendistribusikan, melakukan pendampingan itu semuanya berada dalam koordinasi Badan Bahasa dan kami didukung penuh itu oleh teman-teman yang apa bekerja sesuai dengan bidangnya. Misalnya untuk penilaian buku semuanya diserahkan kepada pusat perbukuan, kemudian untuk pendampingan di daerah itu kami bekerja sama dengan dukungan Ditjen GTK dan juga dengan Ditjen PAUD Dikdasdikmen. *Nah*, ini semua adalah perubahan pola kerja kami, sehingga betul-betul tidak ada lagi yang jalan sendiri-sendiri begitu.

Berikutnya, ini adalah data ya yang apa kita kerjakan pada tahun 2022 lalu ya, yang pertama misalnya untuk terkait dengan pemilihan buku bacaan. Kami pada tahun lalu ya untuk khusus materi literasi itu menyusun ya bahan bacaan literasi sebanyak 716 buku ya yang sudah dinilai. Kemudian kami lakukan pencetakan tapi juga sudah tersedia buku-buku bacaan, bahan bacaan literasi yang bukan buku teks tentu saja jumlahnya juga cukup besar ya di atas 1.000 judul dan ini masih dalam proses penilaian oleh teman-teman di pusat perbukuan.

*Nah*, tadi juga Mas Nino menyampaikan tentang apa peta literasi, kemampuan literasi anak-anak kita ya dan juga kemampuan numerasi sehingga kita golongkan menjadi misalnya jenjang A, B1, B2, dan seterusnya apa kemampuannya.

Kemudian, kami juga membuat pendigitalan bahan bacaan. Tadi Kepala Perpustakaan sudah menyampaikan bahwa, anak-anak kita sekarang sepertinya bergeser gitu ya membaca itu bukan kepada buku cetak tapi juga lebih banyak datanya ternyata untuk buku-buku digital.

*Nah*, kami melakukan digitalisasi bahan bacaan ya, kemudian juga ada penyusunan video animasi pembelajaran literasi numerasi selain mengubah bentuk cetak buku itu kepada buku-buku digital. Tadi Mas Nino juga sudah menyampaikan ada di dalam apa, di dalam laman ya di dalam laman perpustakaan apa pusat perbukuan dan juga ada di laman buku digital Kemendikbud.

*Nah*, pada tahun yang lalu kami di Kementerian di Kemdikbud itu mencetak dan mendistribusikan buku ke-15, ke hampir 20 ribu sekolah ya PAUD dan SD dengan jumlah eksemplar sebanyak 15,3 juta. 1 PAUD, itu itu ada yang daerah 3T ada yang daerah bukan 3T ya. 1 PAUD itu rata-rata menerima buku 80-100 ya, kemudian untuk SD itu rata-rata menerima 1.567 buku, ini pengirimannya apa langsung ya dari percetakan gitu dan itu buku dijamin akan sampai kepada ke sekolah gitu. Kalau itu buku tidak sampai, maka pihak penyedia layanan itu tidak kami bayar.

*Nah*, ini apa yang kami lakukan dan *alhamdulillah* ketercapaiannya tinggi sekali gitu ya lebih dari 99%, yang tidak menerima itu, tidak sampai itu karena misalnya sekolahnya sudah berpindah atau sudah tutup itu atau ketika sekolah tidak merasa yakin bahwa buku ini benar-benar gratis. Karena ada saja yang apa khawatir gitu nanti setelah buku ini diterima kemudian mereka ditagih harus membayar, padahal bukunya itu ada lebih dari 1.500 buku gitu, itu berapa mereka harus bayar. Mereka katakan, "kami tidak bisa membayar ini dari uang BOS gitu". Padahal di situ sudah dilabeli buku ini adalah buku gratis ya, tapi masih tetap saja ada yang-yang apa tidak mau menerima.

*Nah*, untuk menjamin bahwa buku-buku ini betul-betul diterapkan ya dibaca kemudian diteruskan gitu ya, diimplementasikan seperti tadi disampaikan oleh Pak Bandi, kami melakukan pelatihan kepada apa guru-guru ya guru-guru itu kami undang ya pertama ini guru utama, istilahnya guru master. Kami latih dulu ini bersama-sama dari masing-masing wilayah itu kami lakukan pelatihan, kemudian mereka ketika kembali ke wilayahnya masing-masing memberikan pelatihan yang sama kepada guru berikutnya pada tingkat provinsi, jadi berjenjang. Tingkat nasional pelatihan pertama, kemudian pelatihan kedua itu pada tingkat provinsi, lalu mereka akan melakukan pelatihan juga di tingkat kabupaten/kota.

*Nah*, ini yang-yang dilakukan, kemudian kalau kita lihat datanya ya itu sudah ada 29 orang yang kami latih pada tingkat nasional, tingkat pusat begitu, ini bekerjasama dengan inovasi, litara, forum TBM ya taman-taman bacaan masyarakat, mutiara rindang, *reading bugs*, kemudian YLAI, ini semua bekerjasama untuk melakukan pelatihan dan pendampingan.

Kemudian, pada tingkat regional itu sudah dilatih ada 239 orang, pada tingkat kabupaten sudah ada 1998 orang. *Nah*, ini kami bekerja sama dengan teman-teman di UPT-UPT yang ada di bawah Kemendikbud ya. *Nah*, kemudian

kalau misalnya perlu ada hal yang diimplementasikan di masyarakat misalnya, itu kalau harus misalnya terkomunikasi dengan Kominfo ya ada dinas Kominfo, kalau harus ada kunjungan ke perpustakaan kami juga lakukan ke perpustakaan. Kalau misalnya harus dengan Kemendagri maka itu dengan Kemendagri, maka ini sudah mulai berjalan ya apa program ini dan pendampingan kami akan lakukan ke semua sekolah yang tadi jumlahnya 20 ribu itu.

Itu bisa dilakukan oleh UPT, kemudian oleh para mahasiswa yang mengikuti program kampus merdeka, kemudian juga memberdayakan taman-taman bacaan masyarakat gitu.

*Nah*, itu bisa dilihat di dalam layar, ya ada jumlah peserta yang sudah mengikuti pelatihan ya ada 22.266 orang yang datanya kalau diperlukan itu bisa diakses melalui tautan yang ada di halaman tersebut.

*Nah* halaman berikutnya, ini adalah contoh ya buku-buku penunjang literasi yang termasuk ke dalam kategori buku video hasil pengalih wahanaan. Jadi ini ada buku video. Jadi bukan hanya buku yang berupa bacaan biasa, tapi buku video buku itu bercerita begitu, kemudian juga apa anak bisa-bisa menyimak gitu, kemudian apa memahami cerita itu melalui video tersebut, jadi semacam seperti film lah, film animasi begitu.

Kemudian video animasi juga kami kembangkan pada tahun lalu itu ya ada 10 buah dan ini bekerjasama dengan komunitas yang sangat besar pengikutnya dan ini anak-anak yang umumnya ada usia PAUD dan SD kelas awal ya sampai kelas 3 atau kelas 4.

Kemudian yang berikutnya, selain dengan pihak yang tadi di sekolah ya kami juga melakukan pemberdayaan penggerak literasi baik itu untuk generasi muda maupun untuk komunitas literasi di masyarakat. Yang sudah kami kerjakan ini misalnya dengan 14.005 orang ya di apa dengan generasi muda, kemudian ada 797 komunitas di 33 provinsi gitu. *Nah*, ini yang apa kami kerjakan bersama mereka, termasuk tadi memanfaatkan buku-buku yang sudah sampai ke sekolah, baik itu PAUD maupun SD.

Berikutnya, *nah* ini untuk menjamin tadi pencapaian indeks pembangunan kebudayaan karena ada kaitannya dengan apa kemampuan berbahasa Indonesia, kami pada 2 tahun terakhir ini melakukan pengujian kepada anak-anak SD, SMP ya, kemudian SMA, SMK, itu untuk mengikuti UKBI, semacam TOEFL-nya Indonesia lah gitu ya ini tapi khusus untuk bahasa Indonesia.

*Nah* ini merupakan upaya kami ya untuk memperbaiki model pembelajaran literasi karena apa UKBI ini bukan menguji tata bahasa, yang diuji adalah daya nalar, kemampuan berpikir kritis dari yang tingkat dasar sampai kepada tingkat tertinggi gitu. Jadi semakin lama dia mengerjakan tes UKBI ini maka artinya kemampuan berbahasa Indonesianya semakin tinggi, tapi kalau semakin cepat dihentikan oleh komputer maka itu semakin jelek kemampuan berbahasa Indonesianya.

*Nah* berikutnya, ini untuk pembinaan lembaga, saya pikir tidak perlu disampaikan.

Kemudian untuk apa produk kodifikasi ini kamus, kemudian ejaan dan lain sebagainya ini juga ada, terus yang berikutnya ini ejaan yang disempurnakan kita perbaiki kembali ya hal-hal yang sudah usang begitu.

Berikutnya, *nah* ini contoh produk film animasi ya, kita punya 32 film animasi sekarang ini kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan. *Nah*, saat ini produk film animasi ini sedang dalam telaahan televisi ya RCTI plus Indonesiana, kemudian kami ingin juga menayangkan ini sebagai bagian dari informasi di bandara dan di stasiun kereta api. Jadi itu video pendek misalnya kalau kita mau terbang katakanlah ke Lampung, di situ videonya tentang anak Lampung, kita pergi ke Kalimantan Tengah maka videonya tentang video anak Kalimantan Tengah. Jadi sangat tematik cerita tentang anak-anak dari wilayah itu. *Nah*, kita punya 32 animasi untuk yang berbasis cerita lokal gitu, masing-masing ini baru satu cerita untuk satu provinsi begitu.

Kemudian berikutnya, ini adalah program-program literasi untuk tahun 2023 dan seterusnya ya yang dikerjakan di Badan Bahasa bekerja sama dengan apa unit-unit utama lain. Ini memang agak detail ya, tapi saya pikir tidak perlu saya jelaskan semuanya. Yang yang jelas adalah bahwa ini merupakan program yang ditujukan untuk menjawab bagaimana program literasi itu bisa digarap secara bersama-sama oleh unit-unit utama dan juga Kementerian dan Lembaga lain di dalam payung gerakan literasi nasional secara bersama-sama.

Demikian, Ibu Pimpinan yang bisa saya sampaikan.

Bapak - Ibu sekalian,  
Para Anggota Komisi yang saya hormati, dan  
Hadirin yang berbahagia,

Terima kasih.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT :**

*Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,*

Terima kasih, Prof.

Sepertinya kita mendapatkan gambaran yang cukup jelas terhadap masing-masing program yang ada di Perpustakaan Nasional, di Bapenas maupun di Kemendikbudristek, hanya seperti kalimat terakhirnya Prof. Amin supaya tidak berjalan sendiri-sendiri dan digarap bersama-sama sehingga literasi di Indonesia ini akan meningkat nilainya.

Dari teman-teman Bapenas kami membaca apa, ada yang halamannya hilang atau bagaimana ya? yang dicapaian hasil PISA hanya ada sampai

dengan tahun 2018, selanjutnya antara 4 tahun ini 2019-2023 tidak diukur dengan PISA tapi ada pencapaian nilai budaya literasi menggunakan alat ukur yang berbeda.

Bapak- Ibu yang kami hormati.

Jadi acara RDP ini ditujukan untuk mencari solusi bagi peningkatan literasi secara menyeluruh, maka kita melihat di dalam beberapa kali RDP dengan Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Nasional memiliki alat ukur atau standar literasi nasional yang sangat baik. Karena itu kita mendorong supaya mungkin niatkan oleh Badan Bahasa tadi tidak jalan sendiri-sendiri dan digarap bersama, itu menjadi satu mimpi besar yang dapat menjadi kenyataan. Setidaknya khususnya pada saat anak-anak bersekolah perpustakaan itu menjadi perhatian yang sangat-sangat prioritas.

Baik, setelah paparan dari tiga Kementerian yang ada selanjutnya sepertinya Pak Fikri ini yang punya agenda untuk literasi, sebetulnya ini yang mimpin Pak Fikri tapi karena tadi dipanggil Pak Presiden Pak Presidennya Pak Fikri ada hal-hal yang perlu disampaikan terlebih dahulu sebelum kepada Anggota.

Silakan Pak.

**WAKIL PIMPINAN KOMISI X DPR RI (Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH):**

Baik.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Bu Agustin dan Anggota Komisi X yang saya hormati,  
Langsung saja semuanya, Kepala Perpusnas,  
Kepala Badan Bahasa kemudian,  
BSKP kemudian,  
Bidang PMK semuanya saja yang saya hormati,

Saya kira ini beberapa kali sudah Komisi X ini mengundang dan memang yang dibutuhkan itu ini lantas seperti Kemendikbud, Perpusnas RI, kemudian ada Bappenas, bahkan pernah mengundang juga KemenPan-Rb, kemudian Kemendes PDPTT juga. Ini lantas siapa ini yang apa namanya Dirjenya siapa gitu ini, yang butuh itu.

Jadi *monggo* mungkin menjadi diskusi di pemerintahan, karena kalau begini seperti yang dikeluhkan tadi. Jadi sendiri-sendiri gitu dan nanti keluhannya hasilnya kita ini hasilnya nanti selalu 60, nomor 60 dari 63 negara yang disurvei misalnya begitu, akan selalu seperti itu. Sungguhpun mungkin sudah ada usaha secara komprehensif misalnya di Kemndikbudristek misalnya, tapi kan tidak juga dengan Kemendes PDPTT. Di belakang ada juga yang dari TNI ya kalau *nggak* salah pernah juga menyampaikan ke Komisi X bahwa kami biasanya digunakan ini untuk mengajar, untuk apa segala macam,

pemberantasan buta huruf itu di daerah-daerah tertentu sekarang kita belum pernah diajak ngobrolnya gitu, *nah* ini jangan-jangan ini ada yang hilang ini.

Jadi kalau bisa sih mungkin diantara Bapak-Bapak kita punya nanti ada *progress* yaitu bahwa, di Kementerian atau di pemerintah itu ada mungkin secara berkala kewenangannya nanti paling yang paling berwenang siapa mungkin atau mungkin apakah sama-sama nanti di bawah Kementerian Koordinator atau apa sehingga ujungnya literasi.

Jadi kalau bicara literasi rata-rata sebenarnya responnya bagus dan prihatin kalau kemudian dinilai jelek itu. Jadi ya ini kan karena menjawab kita bersama dan bahkan apalagi ya anak-anak kita nanti generasinya sehingga semua sama punya perasaan yang sama, jadi kita tidak kepingin. Tadi kan sama juga apa sesungguhnya sudah sama, tapi lantas seperti apa kalau ini terus begini kan *ndak* bisa ini.

Kemudian di, ini secara umum Kementerian/Lembaga kemudian perpustakaan misalnya khusus bab perpustakaan, secara kelembagaan juga seperti itu ada Perpustakaan Nasional. Kemudian di bawahnya ada Perpustakaan, Perpustakaan itu ada di wilayah provinsi, kabupaten/kota bahkan-bahkan perpustakaan desa, ada lagi TBM, tadi disebut ada rumah pintar dan seterusnya.

*Nah*, ini apa hubungannya antara mereka koordinatif, instruktif gitu, kemudian efektivitasnya untuk meningkatkan literasi itu seperti apa? Nampaknya kalau ada forum-forum itu untuk dalam rangka literasi mungkin akan bisa itu terangkai gitu. Karena TBM kalau nggak salah izinnya di Kemendikbudristek, tapi nanti diskusi banyak tentang buku tentang apa di Perpustakaan Nasional ini kan *nggak* nyambung nih. Jadi kemudian pustakawannya mereka saya tidak punya induk, *nah* misalkan pustakawannya, jadi kalau nanti diteruskan pustakawannya tidak punya induk.

Kalau di sekolah namanya Tendik (Tenaga Pendidikan) bukan guru, jadi namanya tendik yang sekarang sedang menangis karena tidak diberi kesempatan oleh karena Mas Nindo, Prof. Endang dan teman-teman di Kemendikbudristek. Jangan-jangan tidak diusulkan ke Kemenpan-RB karena kemarin Pak Iwan Syahril gitu kemarin mau di data ternyata belum di buka apa namanya formasinya, jadi belum ada formasi.

Jadi sekarang *nggak* ada, padahal ada berapa 33 perguruan tinggi negeri swasta yang ada prodi Ilmu Perpustakaan S1, paling tidak ya ini apa namanya saya *searching* itu paling tidak 33 mungkin lebih, mungkin lebih. Ada negeri dan swasta itu dan universitas-universitas berkelas seperti UI, Unpad, Undip, Universitas Brawijaya, IPB dan sebagainya, UNS dan seterusnya itu ada, universitas negeri dan swasta juga banyak, *nah* seperti apa nanti apa ke depan. Jangan sampai kemudian cuman ditawarkan nanti mereka akan ada kemungkinan jadi PNS, jadi apa kurator, jadi pustakawan, jadi data data *scientist*, jadi TU atau tenaga administrasi, jadi tenaga riset pasar, pengolahan administrasi informasi, bisa juga jadi arsiparis. Emang *nggak* ada sekolah arsip ya, *nggak* ada ya berarti diambil dari perpustakaan, berarti dari arsiparis.



Jadi ini slot-slot yang nanti mereka masa depannya jadi arsiparis dan sebagainya. Itu promosi dari perguruan tinggi untuk merekrut mereka setelah kemudian ada 10-20 slot untuk kemungkinan mereka nanti ditampung di situ, tetapi faktanya tidak ada mau ini disebut salah satunya PNS. Bahkan jadi diplomat, jadi konsultan kebijakan publik dan sebagainya dan sebagainya, kalau konsultan kebijakan publik apa bisanya ini misalnya dari Fisip dan sebagainya itu

*Nah* itu saya kira ini dengan hal-hal itu nampaknya perlu mendapatkan solusi ini untuk diskusi di situ di kementerian dan lembaga, termasuk juga ini saya-saya pernah menyampaikan mengadu ke Perpustakaan Nasional. Padahal ini mungkin di ini ya di Kemendikbudristek bisa diselesaikan karena di kedutaan besar itu ada Atase Pendidikan dan Kebudayaan.

Di kedutaan besar Amerika misalnya itu ada lembaga yang dibikin oleh pemerintah Indonesia, kemudian ternyata itu lembaga yang sangat disenangi oleh pejabat-pejabat Amerika yang mau ditaruh di sini itu dia magang di situ, tapi kesulitannya adalah sumber-sumber bacaannya sedikit tentang Indonesia sehingga minta untuk dikirim. *Nah*, karena Kepala Perpustakaan Nasional itu ngirim buku apa segala macam nanti mau dibuat apa pojok baca digital.

Ternyata juga ada kesulitan, pojok baca digital juga tidak bisa kemudian serta merta karena pojok baca digital beritanya kan mungkin komputer atau apa atau apa, *nah* kan di sana tidak bisa sembarangan menerima. *Nah* seperti itu saya kira problematika di lapangan seperti itu, nampaknya harus diselesaikan.

Kemudian, kan saya juga sudah pernah paparan juga di sini, juga menjadi isu di luar juga, tadi juga disampaikan juga. Bahkan di kami Komisi X itu pernah ke Uzbekistan misalnya, ada dua universitas yang membuka prodi bahasa Indonesia. Harapannya memang hubungan antara Indonesia dengan Uzbekistan semakin bahkan nanti ada penerbangan *direct flight* dan seterusnya, dan seterusnya.

Nampaknya cita-cita untuk bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional itu bukan angan-angan nampaknya begitu. *Nah* tetapi kan harus ada skema, skemanya seperti apa dan seterusnya ini bahasan-bahasan yang sering kemudian dibahas di sini, tapi belum ada ininya belum ada tindak lanjut yang jelas lantas *progress*-nya seperti apa.

Termasuk juga pernah ibu-ibu ke sini misalnya kalau sekarang ini TK, PAUD ini mungkin gatau ini BSKP atau apa yang ada di sini sekarang Mas Nino, jadi atau mungkin bidangnya siapa. Itu kan masih ada juga model-model TK yang ngedril anak-anak supaya bisa baca apa baca tulis misalnya dan sebagainya. Padahal kan ada konsep-konsep seperti misalnya blendoman itu kan apa namanya mengajari bayi anda membaca. Itu tidak mengajari A, B, C tetapi dan itu tidak boleh dites sampai usia lima tahun tuh *ndak* boleh sama sekali dites, tapi nanti akan bahkan anak yang apa namanya anaknya tidak berfungsi separuh saja itu bisa bisa dipulihkan dan itu bisa mempengaruhi fisiknya yang mestinya bisa bertahun-tahun tidak bisa jalan, dia 5 tahun ke

depan bisa-bisa berjalan dan nanti bukan hanya membaca tetapi dia bisa gila membaca karena kemampuan bacanya tinggi karena diajari sejak *golden age* situ.

*Nah* tapi kan konsep ini harus jelas ini, kalau masih ada praktek-praktek yang ngajari A, B, C, D, misalnya begitu ini masih bener apa *nggak* atau pilihan kita yang mana? Ini supaya tidak kehilangan masa depan sehingga sejak *golden age* ini tergarap, ini nampaknya juga perlu ada apa diskusi yang terus-menerus dan bahkan sampai memunculkan apa namanya konsep yang kita sepakati. Sehingga tidak itu tadi syarat masuk SD harus sudah bisa baca, saya dulu *nggak* usah bisa baca suruh pegang gini, kalau telinganya bisa dipegang sudah masuk SD, *enggak* baca *enggak* apa, *enggak* bisa baca, *enggak* bisa apa.

Saya kira begitu, jadi itu sementara saya hanya *me-review* kembali apa yang didiskusikan ini. Mungkin banyak lagi yang saya lupa, karena banyak sekali hal-hal yang terkait dengan literasi karena selalu dikeluhkan, dikeluhkannya dari dulu diskusikan terus tapi dikeluhkannya kita terlambat terus itu, kita tidak pernah ngejar itu tadi apa PISA dan sebagainya.

*Matur nuhun.*

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT :**

*Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,*

Terima kasih, Pak Fikri.

Selanjutnya teman-teman Anggota. Diurut ya seperti biasanya ya, Mas Rano atau Bu Himma dulu. Oh ada Pak Ketua di situ, aduh kacamata saya kacamata kuda nih, dari tadi bisa di-PAW saya nih.

Silakan, Pak Ketua.

**F-PDI PERJUANGAN (dr. SOFYAN TAN):**

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*  
Salam sejahtera,  
Om swastiastu,  
Namo buddhaya,  
Salam kebajikan,

Yang kami hormati Pimpinan,  
Anggota dan tentunya,

Yang kami banggakan Bapak-Bapak dari Kementerian Pendidikan dan dari Pendidikan dan Kebudayaan Dikti kemudian,  
Yang mewakili dari Bappenas,  
Aktor utama kita Bapak Kepala Perpunas, aktor utama, dan kemudian tentunya Bapak dan Ibu,

Saya tadi menyimak tadi dari Bappenas, dari Perpunas, dari Kemendikbudristek saya dengar semuanya itu, ada celetukkan dari teman saya Bu Ratih katanya ini sudah 100 SKS ini.

Artinya, ilmu yang disampaikan itu, kami itu sangat paham tapi persoalannya bagaimana kita meng-*goal*-kan literasi kita itu naik. Kita, saya sudah 8, 9 tahun memasuki 9 tahun Anggota DPR RI Komisi X.

Angka khusus anggaran Perpunas nggak pernah mencapai 1T, paling tinggi kali inilah 2023 yang kami baca 723 miliar, biasanya 500-600, sementara pemerintah kita menyatakan bahwa tahun kabinet ini kabinet kerja itu adalah berbicara tentang peningkatan sumber daya manusia.

Pertanyaan saya kepada Bappenas, yang tau betul tadi Bapak jelaskan itu saya simak, gimana perencanaan sehingga anggaran diberikan kepada Perpunas itu bisa menjawab persoalan kita. Karena persoalannya Perpunas mengajukan begitu banyak program-program tapi *nggak* bisa jalan Pak. Karena ujungnya itu bahkan saya itu kecewa pada hari ini Kemenkeu yang diundang tidak datang, zaman dulu Bappenas asal bilang ini udah oke Kemenkeu mesti keluar duit.

Ini-ini persoalan, ini yang mesti dikeluhkannya itu yang disampaikan semuanya itu kami udah sering banyak dengar gitu. *Nah*, kenapa hari ini perlu RDP antar kementerian dan lembaga, karena kita ingin satu langkah untuk menjawab persoalan itu. Jadi jangan terus-menerus kita berada di *ranking* yang puluhan gitu, menurut Pak Fikri, Pak Fikri dokter, saya dokter.

Jadi kalau dia dokter menyampaikan permasalahan, kalau saya dokter bagaimana cara untuk menyehatkan, memberikan suntikan. Suntikannya itu ya butuh usulan dari Bappenas, merencanakan secara nasional bagaimana peningkatan literasi kita, dengan putusan eksekusi dari Kemenkeu berapa uang yang perlu saya berikan kepada Perpunas, agar peningkatan literasi bukan hanya dalam mimpi.

Sekian dan terima kasih.

#### **KETUA RAPAT :**

Luar biasa, tepuk tangan ini untuk Pak Tan.

Sekalinya saya mendengar Pak Ketua saya kritis, biasanya lembut dan baik hati.

Pak Rano silakan.

## F-PDI PERJUANGAN (RANO KARNO, S.IP.):

Terima kasih, Bu Ketua.

Saya hanya ingin menambahkan saja yang disampaikan Pak Kapoksi saya catat sebetulnya ini. Saya di sini mencatat apa yang disampaikan Bappenas prioritas utama dalam pengembangan manusia, itu prioritas utama.

Memang kalau kita bicara tentang perpustakaan Pak, uang saja tidak ada Pak, jadi sumber daya manusia apa yang anda mau bangun dalam kaitan literasi? Bener, saya mungkin baru di Komisi X ini, tapi hampir 3 tahun saya ketemu dengan Perpustakaan ini selalu luar biasa, anggaran kecil bisa dicapai targetnya tinggi namun *enggak* bisa maksimal karena anggarannya. Mudah-mudahan *nggak* dipotong lagi tahun ini, di potong *nggak* Pak Bando, *nggak* ada surat dari Menkeu? Ada lagi makin jauh lagi targetnya.

Artinya apa, sulit bagi kita. Saya-saya minta maaf, saya harus berilustrasi, Pak. Saya-saya tidak mengatakan saya besar, tapi saya bisa seperti ini karena saya membaca. Kalau Bapak nonton sinetron saya Anak Betawi, umur 8 tahun novel itu saya sudah baca dan saya sampai sekarang berimajinasi sehingga saya bisa menjadi gubernur dan sekarang jadi Anggota DPR.

Itulah faktor-faktor membaca, Pak. Karena sekarang ini saya minta maaf saya pernah di Provinsi Banten, memang kalau di Tangerang Raya perpustakaan bisa dikejar Pak, tapi kalau di Pandeglang, Lebak, jangankan perpustakaan, toko buku aja *enggak* ada.

Ini situasi *real* yang kita hadapi sekarang, saya khawatir suatu saat perpustakaan sudah tidak ada lagi karena literasi kita sudah bergerak dalam konsep yang berbeda, ini yang berbahaya sebetulnya.

Dalam ilustrasi kecil Pak, kecil saja saya masih ingat Pak, mungkin Bapak juga pernah ingat tapi mungkin *nggak* mengamati. Waktu SMP waktu SMA Pak, saya paling sering bertanya gambar pahlawan yang ada di dinding kelas saya Pak. Saya selalu bertanya siapa ini, Diponegoro, siapa ini, Martiana Tiahuhu, siapa ini, Pattimura, dan saya selalu mencari Pak. Saya carinya waktu itu di Balai Pustaka karena waktu itu sekolah di Van Lith, di Gunung Sahari ga jauh dari Balai Pustaka, di situ saya menggali.

*Nah*, sekarang Pak di zaman era ini anak-anak kita sudah sedikit membaca, dia lebih banyak melihat. Mari kita coba bikin survey kecil saja Pak, mungkin tulisan Arab anak kita Pak jauh. Karena dulu kita masih tipis tebal kan Pak, kita masih ingat dulu masih belajar tipis tebal, sekarang tidak karena anak-anak di HP udah pakai, pakai, pakai, pakai laptop, tulis tangan udah sulit.

*Nah*, jadi barangkali Bappenas betul tadi disampaikan, betul tadi disampaikan kita berharap "minta supaya ditambah" karena kita menyampaikan karena ya Perpunas juga berharap kepada kita meminta

*support* ditambah karena target tahun depan ada yang ingin dicapai. Kalau kaya begini kayanya pesimis lagi nih Pak Daeng ya.

Jadi mungkin itu saja, tapi kita tentu sebagai Komisi X tetap semangat karena mitra kerja kita cuman ini, mudah-mudahan tidak menjadi kita mematahkan optimisme.

Terima kasih, terima kasih.

*Wassalamualaikum.*

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih, Pak, Mas Rano.

*Waalaikumsalam,*

Ya silakan Mas Pur.

**F-GOLKAR (H. MUHAMAD NUR PURNAMASIDI):**

Ya, terima kasih.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Pimpinan dan Anggota Komisi X yang saya hormati,  
Bapak-Bapak-Ibu-Ibu yang saya hormati,

Singkat saja, mungkin saya bertanya ke Bappenas, sesungguhnya anggaran literasi kita ini per tahun ini berapa Pak, terus disetor K/L kemana saja, jadi biar kami tau.

Terus kemudian, bagaimana sistem koordinasi dan kerjasamanya? Apakah setiap bulan ada kegiatan apa-apa segala macam atau ada aspor apa segala macam terkait literasi ini sehingga kemudian apa yang disampaikan Bapak tadi *nggak* akan kejadian. Saya mengapresiasi yang dilakukan oleh Perpunas Pak terkait dengan inklusi apa literasi berbasis inklusi sosial, karena semua orang hari ini ketika membaca apa manfaatnya buat saya.

Bagi orang yang sudah di luar sekolah misalnya petani, nelayan, tentu ketika dia membaca apa manfaatnya buat saya. Jadi menurut saya memang akhirnya dengan berani Perpunas ini kemudian mengambil rahangnya dari Kementerian Koperasi dan UMKM. Makanya saya bilang ke Pak Syarif Bando kemarin waktu acara inklusi apa, literasi inklusi sosial di Surabaya, saya datang ke acara perpunas seperti acara Kementerian UMKM, Pak.

Jadi menurut saya *enggak* bisa disalahkan walaupun memang secara anggaran salah, tapi kita harus menjawab ketika orang membaca apa yang saya dapat dari membaca? Ini kan menurut saya karena itu menurut saya koordinasi antara Perpunas dengan Kementerian Koperasi UMKM apa

usahanya? Saya sampai hari ini belum pernah, belum pernah nemu apa bentuknya gitu? Sehingga kemudian inisiasi membacanya di Perpustakaan tapi kemudian diisi-isi oleh Kementerian UMKM misalnya, *nah* ini kan belum ada.

Oleh karena itu, berapa sih sesungguhnya anggaran literasi kita setiap tahun itu dan disebar ke berapa K/L, terus bagaimana sistem kerjanya diantara K/L? *Nah* sehingga capaian-capaian misalnya teman-teman dari Kemendikbudristek *enggak* berjalan sendirian, bisa dalam bagaimana kemudian menjaga agar bahasa Indonesia menjadi bahasa yang dipakai oleh semua masyarakat kita.

Karena misalnya ada Kementerian informasi misalnya, bagaimana kaitan dengan Kementerian informasinya, Kominfo? Karena ini menyangkut misalnya penggunaan bahasa-bahasa di teknologi yang diawasi oleh Kementerian apa komunikasi. *Nah* ini saya yang ingin mendapatkan gambaran utuh sehingga kemudian, apa kita bisa menyelesaikan ini semuanya, kalau tidak ya tadi itu.

Jadi Perpustakaan berkreasi sampai *offside* gitu kan, wah ini lahannya Kementerian Koperasi kok digunakan oleh-oleh apa oleh Perpustakaan kan gitu. Katanya perpustakaan gimana lagi kan memang, kami harus meyakinkan masyarakat ayo membaca, apa manfaat membaca, anda mendapatkan keuntungan ekonomi kan gitu. Kalau tidak ada itu, tidak ada iming-imingnya dalam bahasa kita kan penting. Apa yang disampaikan oleh teman-teman Kemendikbudristek itu kan hanya bersifat yang formal, di PAUD, SD, SMP, SMA, tapi yang di luar itu pasca mereka selesai sekolah, itu kan perlu juga kita pikirkan bagaimana caranya.

Kalau di sekolah resmi kan menurut saya *no problem*, karena itu menjadi bagian dari kurikulum yang harus mereka-mereka apa mereka tempuh. Sama misalnya saya di Lumajang Pak, saya mau bantu perpustakaan sekolah SMK Katolik, kata-kata dinas tidak boleh Pak karena itu *domain*-nya Kemendikbudristek. Padahal mereka sudah hampir 5 tahun mengajukan bantuan buku *enggak* dikasih-kasih, ini Perpustakaan mau ngasih tapi *enggak* mau, lah kan kita bingung ini. *Nah* berarti kan koordinasinya *enggak* jelas.

Jadi karena ini perpustakaan sekolah adalah miliknya sekolah oleh karena itu lari ke Diknas, tapi ketika mereka sudah ajukan bantuan buku misalnya dalam waktu 5 tahun *enggak* ada respon, tapi ketika Perpustakaan mau mengasih, saya udah telepon Pak Syarif Bando, siap ngasih sampai 500 eksemplar buku, *enggak* boleh. Kenapa, karena ini *domain*-nya bukan di Perpustakaan tapi *domain*-nya adalah di perpustakaan sekolah dan itu adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

*Nah*, ini hal-hal seperti ini menurut saya ke depan jangan sampai terjadi lagi, sehingga kami berharap mungkin karena memang di dalam perencanaan dan koordinasinya ada di Bappenas, mungkin ini bisa dibuat berulang-ulang. Yang itu nanti bisa menjadi satu hal yang baku kerjasama antar K/L dan Lembaga-Lembaga sehingga kemudian keinginan kita untuk meningkatkan

A

mendorong tingkat literasi di Indonesia makin hari makin bertambah itu bisa kita pastikan akan terjadi.

Saya pikir itu, Pimpinan.

Terima kasih.

*Wassalamualaikum warahmatullahi.*

**(PERGANTIAN KETUA RAPAT SEMENTARA)**

**KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH):**

*Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,*

Lanjut, siapa, Bu Himma.

**F-GERINDRA (Hj. HIMMATUL ALIYAH, S.Sos., M.Si.):**

Ya, terima kasih, Pimpinan.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Yang saya hormati Pimpinan Komisi X,  
Rekan-rekan Komisi X juga,  
Bapak-Ibu dari Perpunas, dari  
Bappenas dari,  
Kemendikbud dan juga,  
Bapak - Ibu lainnya di jajarannya,

Terima kasih, saya hanya ingin menyoroti mengenai tadi bahwa literasi itu sedang digiatkan dari mulai umur SD ya, tadi di situ di ada di sekolah dasar gitu. Tapi dalam rekomendasi OSCD itu mereka merekomendasikan kalau untuk meningkatkan baca gitu dimulai di *early education learning*.

*Nah*, masalahnya di Indonesia itu kan usia TK itu nggak bisa belajar bahasa begitu, tidak membaca tidak menulis tetapi hanya bermain, tetapi kenyataannya dalam setiap kita mengikuti survei OSCD Indonesia selalu yang terendah dalam nilai skor baca. *Nah* ini yang mungkin harus disinkronkan antara apa yang sudah direkomendasikan oleh OSCD yang tentang survei PISA itu yang membaca disinkronkan juga, bahwa untuk kita meningkatkan nilai baca itu supaya dimulai dari sejak usia dini.

Kemudian yang berikutnya yang saya soroti adalah mengenai Undang-Undang bahasa, tadi tujuannya adalah untuk menginternasionalkan bahasa Indonesia, tapi saya di BSKAP ya, di BSKAP itu Badan Kerjasama Antar Parlemen setiap ada pertemuan-pertemuan internasional saya selalu iri dengan negara lain, *even* Vietnam aja pakai bahasanya sendiri gitu. Vietnam, Korea, Jepang semua pakai bahasa sendiri, kalau bahasa-bahasa yang

mungkin seperti Arab, Prancis, Inggris, mungkin itu kan karena bahasanya memang sudah bahasa besar, jadi bisa dipakai forum internasional, tapi negara-negara kecil pun di forum internasional pakai bahasanya sendiri kecuali Indonesia masih pakai bahasa Inggris, *nah* karena mungkin tidak ada penerjemahnya.

*Nah*, bagaimana langkah dari pihak Bapak-Bapak sekalian untuk menginternasionalkan bahasa Indonesia di forum internasional, mungkin perlu koordinasi dengan pihak dari Kemenlu. Karena saya terus terang saya iri, setiap saya rapat-rapat atau *conference-conference* itu selalu Indonesia tidak bisa memakai bahasanya sendiri karena tidak ada penterjemahnya, *nah* seperti itu.

Jadi untuk kita meningkatkan jati diri kita, daya saing kita sebagai bangsa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 Pasal 31 khususnya, perlu juga disosialisasikan hal ini. Bahkan juga pertemuan internasional yang memang wajib berbahasa Indonesia saja di Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dinyatakan, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam forum yang sifatnya internasional di Indonesia. Tapi lagi-lagi dalam forum-forum yang diadakan di Indonesia selalu menggunakan bahasa Inggris. *Nah* ini bagaimana, padahal dalam Undang-Undangnya disebutkan wajib pakai bahasa Indonesia. Kan ada tuh forum-forum internasional yang diadakan di Indonesia seperti kemarin G20, terus kemudian juga di IPU atau IPU (International Parlemen Union) yang ada di Bali, tetep itu kenapa orang Indonesia *enggak* pakai bahasa Indonesia tapi bahasa Inggris, itu saja pertanyaan saya.

Terima kasih.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH):**

*Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,*

Silakan, Prof.

**F-GERINDRA (Prof. Dr. Ir. DJOHAR ARIFIN HUSIN):**

Terima kasih, Pimpinan.

*Bismillahirrahmanirrahim,  
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Pimpinan dan Anggota dan,  
Mitra kita yang berbahagia,

Sudah kita dengar tadi dari Bappenas ya kita berharap untuk membantu membicarakan kepada Menteri Keuangan lah, mudah-mudahan bisa diwujudkan.



*Nah* kemudian kita tadi mendengar program-program dari Perpunas, dari Kemendikbud yang mana yang bisa di-*channel*-kan. Programnya ada di di Perpunas tapi uangnya *nggak* ada, ada dana di Kementerian Pendidikan yang bisa dikerjakan oleh pendidikan, jadi semuanya bisa terwujud apa yang kita inginkan.

*Nah*, saya ingin ada pesan dari masyarakat, barangkali tinggal saya sampaikan segera, jumlah remaja laki-laki kemayu-kemayu semakin tinggi jumlahnya, kemayu ya. *Nah*, ini salah satu kata mereka penyebabnya tidak adanya guru di PAUD, di TK itu laki-laki, semuanya perempuan. Jadi mereka mengikuti, ini hendaknya kita segera selamatkanlah ya, hampir tidak ada guru laki-laki di PAUD dan TK semuanya perempuan. Jadi anak-anak ya ikut gaya gurunya ini ya terbiasa terus sampai besar ya ini, jangan sampai rusaklah anak bangsa ini.

Baik saya ada, ini kegiatan kita selalu ganti kurikulum, sekolah di pisah tidak pernah berubah, institusi tidak perlu dipikirkan, ya berubahnya gitu-gitu aja. *Nah* ini tidak boleh terjadi ya dari kurikulum 2019, 97, 2004, 2006, 2013, 2016, 2022 kurikulum dan sebagainya kemudian kita.

Lanjut, *nah* ganti kurikulum, ganti nama, programnya ini-ini juga, kita bedah lagi cerita. Seperti sering kita katakan, kalau kita buat jembatan, lanjut. Jembatan rumah salah bisa diperbaiki, tapi pendidikan salah ya masa depan bangsa ini rusak.

*Slide* selanjutnya ya,

*Nah*, akibat gagal pendidikan ini kita tau kita jangan buang muka, ini ada tanggung jawab kita bersama, kita juga sebagai Anggota DPR RI dan juga dari kementerian terkait.

Lanjut, yang sebelumnya, *enggak* nampak waduh.

*Nah*, ada tawuran, begal, tidak mau mantri, kerusuhan, mencuri, merampok, gorosan, perkosaan, tidak peduli, egoisme, tidak toleran, sadis, kerusakan, diskriminasi, perundungan, banyak lagi, ini akibat kegagalan pendidikan kita. Pendidikan kita tidak mendahulukan.

Lanjut, *nah* itu tadi, *nah* lanjut, sebelumnya, sebelumnya, sebelumnya, saya kira ini satu lagi, oke lah.

*Nah* pendidikan karakter kita tidak kita utamakan, hanya sekilas ya kita dari mulai SD sampai perguruan tinggi dengan karakter kita hanya sekilas. Lanjut aja tadi, lanjut Pak ya.

Tidak mengutamakan karakter seperti negara-negara maju seperti New Zealand kita lihat ya, Finlandia, Jepang dan sebagainya karakter ini didahulukan berdasarkan kata menteri "kalau kita ke Jepang, kita tes anak-anak TK, kita buang tisu pasti ada yang mengambil, buang ke tong sampah". Di kita sih *enggak* ada yang menoleh, keluar kulit kacang, rambutan, artinya

orang yang sudah terdidik pun tidak melakukan itu, *nah* ini menjadi masalah kita.

Bagaimana seharusnya? Pendidikan karakter kita dahulukan. Tingkat SD, SMP, SLTA ini kita dahulukan baru ilmu pengetahuan, kita ilmu pengetahuan didahulukan. Ya ada satu kajian seorang doktor membandingkan pendidikan kurikulum kita dengan pendidikan di Jepang anak kelas 4 SD di Indonesia sama dengan kelas 6 SD di Jepang saking hebat di Indonesia, tapi dari segi etika akhlak mereka di atas, kita di bawah.

*Nah* ini yang jadi cermin kita, marilah kita dahulukan, kita selamatkan bangsa kita ini, ya sama-sama kita, sama-sama Komisi X ini dengan Kementerian dan membangun bangsa ini melalui karakter. Ya sehingga betul-betul anak kita berilmu dan berkarakter. Hebat bangsa ini karena kalau orang jujur punya orang-orang besar, diisi oleh orang yang punya karakter kejujuran dan sebagainya.

Jadi kita tidak bayangkan kalau begini terus pendidikan kita, kita khawatir ya bangsa ini menjadi apa. Tawuran itu anak-anak sekolahan yang berantem bikin kejahatan itu semuanya umur-umur sekolah dan mereka pernah sekolah tapi sekolah tidak pernah mendidik ya. Antri aja *enggak* pernah diajarkan kepada kita, antri tidak pernah diajarkan. Saya baca di New Zealand 4 halaman itu apa, itu antri, apa guna antri, apa keuntungan antri, apa kelebihan antri, kita satu kalimat pun tidak dipelajari tentang antri.

Jadi kalau kita pergi ke Malaysia, oh itu tuh orang Indonesia tuh tidak tahu beratur kata orang Malaysia, berebut-berebut gitu, kita tidak pernah diajarkan. Marilah kita *enggak* usah tinggi-tinggi kali, *enggak* usah berebut-berebut bisa tapi kita perbaiki ahlak bangsa sehingga kita bisa bertanggung jawab nanti ya di akhirat nanti.

Terima kasih, Pimpinan. Mohon maaf

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH):**

*Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,*

Lanjut, oh silakan Mbak Ratih.

**F-P. NASDEM (RATIH MEGASARI SINGKARRU, M.Sc.):**

Baik, terima kasih, Pimpinan.

*Bismillahirrahmanirrahim,  
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Yang kami hormati Pimpinan beserta,  
Seluruh Anggota Komisi X dan juga,

Seluruh narasumber kita hari ini,

Terima kasih atas penyampaian-penyampaiannya dan *insyaallah* Pak Syarif ini salah satu bukti komitmen Komisi X memang selalu berjuang agar Perpustanas itu anggarannya *nggak* segitu-segitu aja gitu. Jadi sebenarnya cukup disayangkan sih memang bahwa tidak ada pihak Kemenkeu ikut juga rapat dengan kita di sini. Padahal saya juga tahu ujung tombaknya itu selain ada di Bappenas juga adalah di Kemenkeu gitu.

Dan juga sedikit apa mem-*follow up* yang tadi disampaikan oleh seluruh narasumber, saya memang berpikir dan juga merasa bahwa definisi literasi kita itu bukan lagihanya sekedar baca dan juga tulis dan ini adalah saya bisa bicara gini karena menangkap dari apa yang disampaikan oleh Bapak-Bapak semua, yang dimana di luar daripada itu bahwa definisi literasi ini harus bisa membuahkan suatu hal yang produktif dan juga memiliki *value* ataupun nilai tambah yang *alhamdulillah* kalau itu bisa berujung ekonomis gitu.

Apalagi kalau kita kembali ke beberapa bulan lalu pernah Raker dengan Perpustakaan Nasional juga. Saya ingat betul Pak Syarif juga pernah bilang bahwa Perpustanas ini sudah banyak membantu banyak orang ribuan masyarakat Indonesia dengan pengetahuan yang baru gitu ya melalui Perpustanas. Yang di mana melalui Perpustanas ini banyak *value-value* yang bisa didapat oleh orang-orang ini, salah satunya adalah mereka ada yang bisa membuat perusahaan *catering* rumahan, ada juga yang membuat jasa perbaikan kendaraan dan lain sebagainya.

*Nah* dengan data dari Perpustanas ini kita bisa ketahui bahwa sebenarnya melalui peningkatan literasi memang itu bisa meningkatkan produktivitas yang sifatnya itu ekonomis gitu ternyata. Jadi, lagi-lagi yang ingin saya tekankan adalah definisinya selalu bisa baca ataupun bisa tulis, tapi kita lebih mengedepankan lagi bahwa ini bisa bersifat ekonomis.

Maka dari itu sebenarnya ini sungguh sangat penting sekali dan juga saya agak sedikit menyayangkan karena sering tidak jarang kita suka lempar-lemparan. Ini sebenarnya yang bertanggung jawab terkait literasi, ini siapa sih penanggung jawabnya? Kadang kita lempar-lemparan dengan Perpustanas, dengan Kemendikbud juga karena sebenarnya ini beririsan kan gitu. Jadi sebenarnya secara nasional kita nih jadi *nggak* tau sebenarnya penanggung jawab penuhnya terkait literasi, ini siapa sih.

Dan saya jadi ingin bertanya, apakah ada baiknya *nggak* jika ada misalkan ya ini jika ada perubahan nomenklatur misalkan menjadi badan literasi dan Perpustanas gitu. Jadi kan kalau misalkan sudah seperti itu kita tau nih penanggung jawabnya itu siapa untuk peningkatan literasi, maka menurut saya juga sudah sewajarnya ada peningkatan anggaran di situ gitu. Karena kalau kita bicara literasi, itu sedih memang kalau misalkan hanya berpaku melalui Perpustanas dengan anggaran yang tidak seberapa. Bahkan tadi dari senior saya, ini selama beliau 9 tahun ini adalah berpusat tertinggi yaitu 720M, tidak pernah menyentuh angka bahkan 1T aja *nggak* pernah gitu.

Jadi semoga ada hal yang bisa kita petik dipertemuan ini dan benar-benar bisa berbuah sangat manis ke depannya, khususnya untuk kemajuan literasi kita.

Mungkin itu saja, Pimpinan.

Terima kasih.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH):**

*Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,*

Ke sini katanya, Puang.

**F-PKB (Drs. H. ANDI MUAWIYAH RAMLY, M.Si.):**

Baik.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Terima kasih, Pak Fikri.

Bapak-Ibu yang saya hormati,  
Bapak-Bapak semua yang sama-sama kita hormati juga,

Kalau soal apa namanya literasi ini juga saya pikir sudah hampir dua tahun terakhir ini pak Syarif Bando selalu menyampaikan kita dan itu *clear* sebetulnya kalau secara konsep. Literasi adalah kedalaman pengetahuan dan seterusnya ujungnya adalah persaingan global dan ini yang berat.

Minggu lalu atau minggu-minggu yang lalu, saya menyampaikan buku kepada 6 komunitas baca. Saya bertemu di dapil itu, saya ini biar Bappenas agak tau, Pak Bando. Ya kami berkumpul di samping graha tani juga graha baca, mereka itu menerima buku dengan sangat-sangat gembira dengan segala macam pesta- pesta kan kita menerima buku di komunitas ini, di videokan, lengkap saya videonya dan saya sudah kirim kepada Pak Syarif.

Begini, persoalannya bukan hanya sekadar itu, buku-buku itu ada 500 per komunitas dengan 257 judul buku-buku yang dikirim di mungkin saya akan mengkritiki itu tadi itu buku tidak apa tadi disampaikan oleh Bapak bahwa ada buku standar buku yang kurang. Kalau yang di-*share* oleh Perpustakaan Nasional itu yakin buku sangat-sangat bagus. Persoalannya ketika masyarakat itu misalnya lele, berternak lele, berternak ikan, berternak burung, cara menanam cengkeh, cara menanam jeruk dan seterusnya mereka pasti bertanya bagaimana menanamnya dibuat sendiri. Bukunya sudah kami dapat, modalnya dari mana.

*Nah*, saya pikir itu *linkages* dengan Kementerian terkait saya pikir, bukan kalau dibiarkan Perpunas bekerja sendiri itu tidak sanggup dengan ranah hanya sekian, 514.433.560.000 itu cukup, belum lagi dipotong lagi dipotong lagi.

Kami di sini semuanya Bapak-Bapak semuanya, terutama dari Kemendikbud dan bahasa dan Bappenas. Ini kami sering berangan-angan, kami di sini berulang-ulang mendengarkan Perpunas itu bagusnya dapat 10 triliun, bagusnya 10 baru bisa apa yang disampaikan per selalu dengan sangat laporan-laporan sampai mendapatkan 21 penghargaan, setiap melaporkan kepada kita tapi itu tidak terwujud semua dalam kenyataannya di lapangan.

Karena itu misalnya begini, Bapak tadi bicara juga tentang RPJMN 2020 dan 2024 itu sudah tuntas Pak dilaksanakan oleh Perpunas karena kita kan bermitra, hampir setiap bulan dua kali kita rapat, sudah langsung dilaksanakan dengan segala keterbatasannya, tetapi mari kita lihat perbandingan ini, *not compare* sebetulnya perlu saya sampaikan.

Perpustakaan Nasional itu cuma 514 miliar, coba kita lihat di laporan Bapak yang sama tadi, program pengajuan dan pelatihan pelestarian kebudayaan di dikti Kemendikbudristek itu 1.292.650.000.000 di situ juga ada 41 miliar 75 miliar untuk mendukung literasi. Itu kan sangat timpang sekali kalau misalnya ada perbandingan-perbandingan.

Pak Bandi, ini, ini Pak ini saya sampaikan, jadi apa namanya apa yang disampaikan tentang literasi itu sebetulnya deliverasinya ke bawah itu menjadi jomplang, kalau misalnya kita bicara tentang angka dan itu kegelisahan kami selama 3 tahun ini sebagai mitra kami. Bagaimana kami bisa mendukung dan lain betul-betul merasakan di dapil itu perbantuan Perpunas yang sangat terbatas itu. Kalau Bapak kesulitan tidak ragu-ragu bukunya sampai tidak serahkan kepada kami Pak, langsung itu bukunya sampaikan kalau kami curi apa buku-buku *enggak* sampai ke komunitas. Sampai ke lapangan Pak guru-guru itu kan ini kan kelihatannya tidak banyak menyentuh, hanya pelatihan guru dan lain segala macam.

Komunitas kami di dapil kami rata-rata di sini dipilih 125 ribu orang Pak itu, sedangkan Pak Menteri dengan kementrian/lembaga ini kan Bapak ini cuman 2 orang, Presiden dan Wakil Presiden yang milih Bapak untuk Menteri-Menteri itu. Kami setiap orang di sini mau nomor 1 semua *ndak* ada nomor 2 di sini, pasti nomor 1 semua yang bisa duduk di sini. Kalaupun ada nomor 2 ini dapil itu ada dua orang di dapil seperti Golkar itu nomor dua, di dapil kami, tapi saya karena tentu berbeda apa namanya Fraksi anu komisinya *nggak* ada nomor 1, *nggak* ada nomor 2, nomor 1 semua.

*Nah*, yang ingin saya sampaikan sebetulnya bahwa jelas, *clear* tentang masalah literasi ini. Tadi saya tarik semua untuk bapak semua satu per satu, saya seperti Prof. Djohar jawab tadi, misalnya disampaikan tingkat literasi kita itu ada 5 tingkatan literasi. Pertanyaannya saya sudah jawab dengan kendala-kendalanya kita berada ditingkatan literasi berapa? Baik dari kajian internal ataupun kalau UNESCO dia menetapkan untuk, yang mana sebetulnya untuk setiap negara.

Kan begini, juga langsung kepada Pak Syarif Bando, tingkatan literasi membaca tulis itu dan pembentukan karakter yang langkah pertama itu. Saya pikir langkah kedua bentuk praktik juga perlu. Tiga, langkah ketiga, tingkatan ketiga perlu karakter di tingkatan literasi ke empat perlu karakter. Kelima perlu juga karakter itu bukan cuman di awal-awal itu. Kenapa, kita sendiri ada gubernur, profesor, doktor, artinya sudah lengkap lah 5-5nya. Seharusnya dia ada 6, profesor, doktor, yang jadi Gubernur sudah masuk penjara, masuk pesantren, korupsi, kan ada begitu tuh.

Jadi itu kalau langkah-langkah ini tidak menentukan di samping karakter-karakter itu, jadi perlu ini masukan saya, usulan itu tidak terlalu penting, tapi ini menyangkut semuanya tentang paradigma, paradigma itu saya terjemahkan sebagai gugus pikir, gugus pikir.

*Nah*, kalau bicara tentang gugus pikir kemudian kembali lagi ke Pak Bandi, apa sebetulnya gugus pikir yang dicerna Bappenas di dalam merancang anggaran untuk kita ini, belum lagi dari Bapak sudah dikeluarkan sekian potong lagi dari Kementerian Keuangan yang *ndak* datang hari ini.

Kita sebetulnya cita-cita Pak, kita mau dengan Bapak itu waktu pertemuan dulu cita-citanya ingin menghadirkan Menteri Keuangan, Bapak sendiri gimana supaya apa namanya keluhuran bangsa ini dengan literasi lewat perpustakaan itu bisa tercermin dalam lidah kita, pikiran dan otak kita itu bisa sampai ke sana yang sudah *lips service*.

Pembentukan sumber daya manusia tapi tidak dibentuk tapi yang lain saya apa namanya bisa membuktikan bahwa teori-teori Bapak itu tidak salah, salah, mari kita buktikan.

Bapak hari ini pergi ke perpustakaan, pergi ke Gramedia jalan Salemba Raya, itu penuh lorong-lorong anak-anak membaca. Saya tanya satu-satu kenapa membaca, tak sanggup membeli Pak, bukan karena tidak mau membaca, tidak sanggup membeli. Bapak bisa hentikan apa anu apalah asumsi saya bahwa bukan karena masalah-masalah *enggak* mau membaca sebetulnya, mereka itu didorong membaca buku dan tidak dilarang oleh apa namanya penjaga toko *ndak* dilarang, duduk semuanya itu, saya lihat anak-anak ini apa, ya membaca 7 lembar, 5 lembar pulang mereka, *nah* itu. Jadi masalahnya masalah ekonomi sebetulnya.

*Nah*, itu tidak saya sampaikan semuanya ini kan karena pengalaman-pengalaman kita masing-masing, tapi sekali lagi saya salut bahwa apa yang dilakukan oleh Perpustakaan selama ini, selama 3 tahun ini dengan rancangan pojok baca, dengan perpustakaan berjalan dengan bangunan-bangunan perpustakaan yang ya sedapat mungkin bisa dibangun selama ini itu sudah sangat bagus. Kami berkunjung di Aceh itu juga sudah bagus, di Jawa Tengah sangat bagus perpustakaanya sudah penuh mahasiswa yang datang ke sana untuk mencari literasi itu, apalagi dengan sistem digital ini sudah disiapkan oleh perpustakaan.

Tapi sekali-sekali kita uji petik, uji petik lah Bapak-Bapak semuanya kalau kita masuk di sebuah kementerian, kita masuk di sebuah sekolah, kita coba tunjukkan siapa yang punya, *ndak* bawa dompet, siapa yang punya kartu perpustakaan. Saya punya kartu perpustakaan, saya punya perpustakaan dan saya sudah mengatakan bahwa anak saya juga ke perpustakaan. *Alhamdulillah* ke sana bukan hanya sekedar ambil buku, tapi disuguhi makan siang oleh Pak Kepala Perpustakaan, anak saya senang sekali, kapan lagi Pak kita ke sana lagi, senang dia Bu.

Saya pikir itu yang saya sampaikan, persoalannya sama dengan yang disampaikan Pak Tan. Gugus pikir atau paradigma di dalam membuat rancang program di Bappenas ini sebetulnya apa? Betul-betul ingin bangun sumber daya manusia lewat penguatan literasi atau ini sekedar bahwa RPJM seperti yang tadi yang digarisbawahi itu ya apalah adanya.

Saya pikir dari Komisi keluhuran bangsa ini, komisi pendidikan ini perlu meneriakkan itu terus Pak, perlu meneriakkan ini semua. Kita sangat ketinggalan, sangat tertinggal, sangat tertinggal meskipun ada standar-standar UNESCO, ada standar-standar semuanya itu tidak penting. Tapi bagaimana ini pembiayaan tentang pembacaan untuk mencerdaskan seperti amanat pembangunan, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu bisa menjadi kenyataan.

Saya menulis di beberapa tempat bahwa, dalam hal pendidikan termasuk dalam literasi kita belum melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 itu pembukaan mencerdaskan kehidupan bangsa, kita belum cukup cerdas, ada juga yang cerdas seperti Pak Habibie tapi bukan produk Indonesia itu, produk Jerman. Banyak, banyak-banyak yang di luar, banyak juga kita berikan beasiswa mereka tidak mau balik lagi ke sini itu.

Mungkin itu yang mau saya sampaikan. Terima kasih Pak Kapoksi sudah menyampaikan di berita saya di saya diberi kesempatan untuk berbicara lebih dulu.

*Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq,  
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

#### **(PERGANTIAN KETUA RAPAT)**

**KETUA RAPAT (AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI, S.S., M.M.):**

*Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.*

Bapak - Ibu kita memperpanjang waktu sedikit saja, apakah dari sisi kiri ada lagi? Cukup, cukup baik.

Maka dengan selesainya pertanyaan, tanggapan dari para Anggota Komisi X.

**F-PAN (Prof. Dr. ZAINUDDIN MALIKI, M.Si.):**

Dari *virtual* boleh, Ketua?

**KETUA :**

Eh ada suara tanpa wajah.

**F-PAN (Prof. Dr. ZAINUDDIN MALIKI, M.Si.):**

Ada muncul wajahnya.

**KETUA RAPAT (AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI, S.S., M.M.):**

Iya ini baru muncul wajahnya.

Silakan, Prof.

**F-PAN (Prof. Dr. ZAINUDDIN MALIKI, M.Si.):**

*Bismillahirrahmanirrahim,  
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Pak Syarif Bando yang saya hormati, beserta  
Jajaran Perpustakaan,  
Kemendikbud dan,  
Bapak-Bapak dari Bappenas,

*Alhamdulillah* saya bisa mengikuti walaupun melalui *virtual*, secara *virtual*. Saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan pengembangan perpustakaan dan lebih khusus lagi adalah peningkatan kesadaran literasi.

Bagi saya perpustakaan dan peningkatan kesadaran literasi itu adalah sesuatu yang amat strategis. Bagi saya adalah pintu utama untuk membangun atau untuk melahirkan manusia-manusia unggul, manusia modern atau manusia berkemajuan. Hampir sulit dipahami ada manusia unggul, ada manusia yang modern atau berkemajuan kalau dia tidak punya budaya literasi yang baik. Sementara kita ini bangsa ini diberi karunia begitu banyak modal tapi belum bisa dimanfaatkan dengan baik, oleh karena kita belum cukup bisa menghasilkan manusia-manusia yang unggul itu gitu loh.

Jadi, kalau literasi kita bagus, kita punya stok atau persediaan manusia-manusia yang unggul sehingga bisa melahirkan bagaimana banyak begitu aspek kehidupan ini menjadi lebih baik juga. Apakah itu aspek ekonomi, politik, budaya, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, itu semua sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran literasi anak-anak bangsa ini.



Pak Syarif Bando banyak berkisah kalau berkaitannya dengan relasi antara tingkat kesadaran literasi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Itu artinya ada *value edit*, nilai tambah yang bagus dari pembangunan peningkatan kesadaran literasi terhadap kesejahteraan ekonomi, tetapi di aspek yang lain rasanya juga masih membutuhkan perhatian.

Bagaimana relasi antara kesadaran literasi dengan pembangunan budaya politik misalnya. Hingga hari ini budaya politik kita ini masih berhenti pada tataran budaya politik transaksional, belum sampai kepada upaya kita membangun budaya politik yang substansional, yang substantif, masih transaksional, sehingga yang lahir dalam proses-proses politik itu begitu banyak politisi-politisi yang menurut saya masih jauh dari harapan masyarakat.

Di aspek budaya kami melihat kalau kita membuat ukurannya buku Yama, masyarakat yang maju dari aspek budaya apabila dia punya modal budaya, modal sosial dan modal budaya. Apa itu modal sosial dan modal budayanya itu adalah *trust*. Nah bangsa ini saya melihat masih *zero trust*, *low trust* paling tidak seperti itu, masih lebih mudah muncul prasangka daripada mudah saling memahami satu sama lain. Perbedaan sedikit saja sudah membelah masyarakat sehingga sulit untuk bisa bertemu. Kemudian dari segi ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita juga masih memprihatinkan.

Yang terakhir yang ingin kami sampaikan di forum ini, kesadaran literasi yang paling dasar adalah baca tulis. Menurut saya itu sangat penting, membaca dan menulis itu berhubungan erat. Kita lihat, Pak Syarif, Bapak-Bapak dari Kemendikbud, dari Bappenas, menyedihkan sekali dalam-dalam literasi baca tulis ini.

Insan-insan akademis yang ingin meraih, mencari gelar guru besar, mereka manusia-manusia akademis yang disyaratkan dia harus menulis. Apa yang terjadi perjokian, nah ini kan indikator literasi di bidang pengetahuan, di bidang intelektual, di bidang akademik, tetapi masih sangat menyedihkan. Setingkat tenaga akademik ingin meraih gelar guru besar untuk menyiapkan tulisannya sebagai syarat untuk pengajuan gelar guru besar, dia memakai praktek perjokian, ini sangat menyedihkan.

Nah, dengan tantangan yang seberat ini sebenarnya ada satu pertanyaan, terutama pada Bapak-Bapak dari Bappenas ini, dari Bappenas ini. Sebenarnya seberapa strategis sih perpustakaan ini dan wabil khusus peningkatan kesadaran literasi itu seberapa penting di mata perencanaan pembangunan nasional kita ini.

Saya ingin melihat indikator bahwa, perpustakaan ini menurut ahli perencanaan kita, pejabat yang berwenang membuat perencanaan ini menempatkan perpustakaan dan peningkatan kesadaran literasi itu seberapa penting, saya ingin tau ini.

Kalau menurut saya selesai tugas kita meningkatkan kesadaran literasi, kita itu akan punya sumber daya sumber daya yang unggul, manusia Indonesia yang terdidik bermental kuat. Manusia yang unggul dan kalau ini kita miliki bangsa ini saya kira akan menjadi bangsa yang berada di halaman terdepan di

dalam pergeseran kekuatan global dari barat ke Asia yang sekarang setengah terjadi saat ini, saya kira itu.

Terima kasih, Pimpinan.

*Wassalamualaikum warahmatullahiwabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI, S.S., M.M.):**

*Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatu.*

Terima kasih, Prof.

Menguatkan pendapat teman-teman yang ada di ruangan komisi ini. Mungkin saya perpanjang dulu ya 15 menit.

**(RAPAT:SETUJU)**

**(KETUK PALU 1 KALI)**

Setelah pertanyaan, tanggapan, saran dan permintaan dari terakhir permintaan dari para Anggota, selanjutnya kami persilakan pada masing-masing, mungkin 2 menit. 2 menit Pak ya masing-masing untuk memberikan respon, mulai dari Pak Kepala Perpustakaan.

Silakan.

**KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (Drs. SYARIF BANDO, M.M.):**

Terima kasih.

Para Ibu Pimpinan juga,  
Seluruh Anggota Komisi X DPR RI,

Yang telah menyatakan dan menyampaikan apresiasinya terhadap program yang kita sampaikan. Tentunya kami berterima kasih kepada Pak Bando selaku Plt Deputi, Pak Ami, juga Prof. Endang dan juga Pak Anindito terima kasih.

Ada dua hal yang kami ingin sampaikan, yang pertama saya dengan judul sebagai masyarakat memasukkan kepada Pak Prof. Endang untuk Pak Menteri sejauh mana kita melibatkan pemerintah daerah dalam pendidikan ini? Saya selaku rakyat biasa mengamati betapa peserta didik kita dari pra-TK hingga doktoral itu sangat asing dengan potensi sumber daya alam kita, sehingga kami selalu mengajak pemerintah daerah agar bupati punya, bupati/walikota punya program untuk menulis tentang asal-usul kebudayaannya, terutama karena programnya Prof. Endang. Potensi sumber daya alamnya, para wisatanya, ekonominya dan sebagainya, dan itu melibatkan pembelajaran sehingga nanti anak generasi kita tidak *lost* daripada potensi yang kita miliki.

Kemudian yang kedua sejalan dengan apa yang disampaikan tadi Prof. Zainuddin Maliki, memang sebetulnya pembangunan literasi harus menjadi pondasi bagi kita di Indonesia. Karena diprediksi 30 tahun ke depan Asia akan dihuni kurang lebih sekitar 6 miliar penduduk dan kita tahu semua bahwa Indonesia adalah jantungnya Asia dan Indonesia akan menjadi kekuatan ke-3 setelah Tiongkok dan India.

*Nah*, persoalan literasi ini kan kita sudah sama paham bahwa, kemampuan memproduksi barang dan jasa dan batas teritorial wilayah nanti itu tidak pada batas-batas kekuasaan, tetapi adalah batas-batas kemampuan produksi dan kita tau semua bahwa, agenda besar dunia cuma satu kita akan menuju kepada siapa menjadi negara produsen dialah pemenang dan karena itu pondasi untuk menanamkan sistem pendidikan kita yang mereformasi seluruh sistem pembelajaran yang formalitas menjadi pendidikan yang betul-betul mengarahkan kepada kemampuan produsen, ini harus disepakati bersama.

Kira-kira itu yang kami sampaikan Ibu dan bagaimana pun juga kami menyampaikan terima kasih atas dukungan penuh dari Bappenas selama ini, dan juga Kemendikbud kami sedang mencoba untuk menyelesaikan dan sudah ke lapangan. Mungkin persoalan batasan tentang sekolah tadi yang mau menerima buku itu mungkin perlu ditinjau dari Kemendikbud memang. Karena bagaimanapun Kemendikbud adalah milik negara yang harus menjadi seluruh bangsa dan kalau tidak salah, saya mengikuti pidato Mas Nadiem pada awalnya sudah menyampaikan bahwa, "pendidikan ini bukan hanya pendidikan yang tercatat tetapi juga semua masyarakat". Jadi mungkin itu peraturan untuk membatasi pemberian bantuan itu segera dicabut itu.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI, S.S., M.M.):**

Terima kasih.

Selanjutnya, Prof. Endang Aminudin silakan.

**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA INDONESIA KEMENDIKBUDRISTEK RI (Prof. H. ENDANG AMINUDIN AZIZ, M. A., Ph. D.):**

Baik, terima kasih, Bu Pimpinan.

Tampaknya memang apa benang merahnya sih sudah ketemu ya di mana kita perlu bersinergi, karena masing-masing sudah ada programnya yang tentu saja ini masalah orkestrasi ya untuk menguatkan program-program yang sudah ada ini. Supaya irisan-irisan yang terjadi itu betul-betul bisa saling menguatkan dan inilah substansi yang tadi saya sampaikan, apa perlunya

koordinasi di antara setiap pemangku kepentingan dan apa yang pemilik program literasi sehingga tidak apa tidak masing-masing itu.

*Nah*, sebagai sebuah ilustrasi sederhana kami di di Badan Bahasa membuat satu program yang namanya Geulis Bu. Geulis itu memang seperti orang Sunda itu geulis itu cantik ya, *nah* tapi ini adalah singkatan Gerakan Untuk Literasi Semesta. Kami uji cobakan ini di NTB, di Nusa Tenggara Barat. *Nah*, untuk pelaksanaannya kami menggandeng semua komponen di masyarakat. Ya ini sekaligus juga menjelaskan kepada Kepala Perpustakaan, semua komponen di masyarakat pemerintah daerah untuk secara bersama-sama menggarap masalah literasi. Perpustakaan itu kami libatkan, Kominfo, Dinas apa, kemudian Kemendes, kemudian apa dinas sosial begitu, di samping tentu saja UPT yang ada di bawah Kemendikbud gitu.

*Nah*, ini dalam praktiknya justru kebersamaan ini yang telah membuatkan hasil yang sangat baik begitu ya, anak-anak belajar kemudian masyarakat terlibat bagaimana cara apa menerapkan ada pembelajaran yang lebih bermakna gitu. *Nah*, ini yang menurut saya jenis kolaborasi seperti ini yang harus terjadi di dalam program-program ke depan dan tentu kami di Kemendikbudristek sangat senang ya untuk bisa secara bersama-sama menggarap ini, karena literasi itu adalah urusan bersama yang harus digarap bersama-sama gitu ya.

Terima kasih, Bu Pimpinan.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih, Prof.

Selanjutnya dari Bappenas, Pak Dr. Ir. Subandi silakan.

**PLT DEPUTI BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA, MASYARAKAT DAN KEBUDAYAAN KEMENTERIAN PPN / BAPPENAS (Dr. Ir. SUBANDI., MSc):**

Terima kasih, Ibu Pimpinan, dan  
Terima kasih untuk Bapak-Ibu tadi yang sudah memberikan masukan yang sangat berharga bagi kami,

Jadi saya ingin memulai menjawab secara singkat yang terakhir tadi dari Prof Maliki tadi, seberapa penting ini Perpustakaan dalam apa meningkatkan, meningkatkan kesadaran literasi begitu ya, pandangan Bappenas.

Jadi dalam konteks pembangunan manusia tadi kami sudah menyampaikan bahwa ada tiga pilar yang harus dikembangkan untuk mempunyai manusia unggul. Yang pertama adalah seluruh kebutuhan dasar manusia itu harus dipenuhi, pendidikan Kesehatan itu dua. Kemudian, manusia harus produktif itu pendidikan tinggi, IPTEK, kemudian pendidikan vokasi, kemudian karakter. Pembangunan karakter antara lain juga didukung oleh budaya literasi dan budaya literasi itu bukan hanya apa tugasnya Perpustakaan Nasional.

Jadi literasi itu dibangun ya dari keluarga dari bangku satuan pendidikan, Pak. Jadi seluruh anggaran pendidikan ini ya untuk membangun literasi sebetulnya, bagaimana membudayakan yang minat baca itu harus ada dan budaya baca kalau masyarakat mempunyai baca yang tinggi, minimal anak-anaknya itu juga apa, dibimbing itu juga suka membaca begitu. *Nah*, ini menjadi tugasnya memang Perpustakaan Nasional.

*Nah* tadi terkait anggaran. Alokasi anggaran itu bukan hanya Perpustakaan, yang paling besar memang Kemendikbud. Di Kemendikbud ada Badan Bahasa dan Badan Bahasa ini kalau dilihat tadi dibandingkan dengan Perpustakaan jauh di bawah Perpustakaan Pak anggarannya. Jadi untuk literasinya itu Pak itu hanya 107 miliar, kami menghitung Pak. Jadi nanti mohon dihitung kembali program bahasa dan budaya itu ada 101,2 triliun dan Perpustakaan itu bukan, Bappenas melihatnya bukan hanya anggaran yang ada di pusat tapi juga DAK, Bapak.

Jadi 720 sekian ditambah 525 DAK, jadi itulah anggaran yang sebetulnya tadinya yang DAK itu adalah dari pusat gitu, karena perpustakaan itu kewenangan daerah itu yang di transfer ke daerah. Jadi itu yang apa harus betul-betul dimanfaatkan dalam rangka membangun budaya literasi tadi itu. Jadi ini apa bahwa nanti kurang atau tidaknya ini harus apa kita lihat apa yang harus kita perkuat. Jadi ini yang mungkin lebih proporsional gitu.

Jadi dari-dari kami itu Bapak-Ibu apa tentunya kami selama ini selalu mendukung Perpustakaan Nasional kalau kita anggarannya, walaupun tidak pernah turun Pak. Naik walaupun sedikit gitu ya dan DAK-nya itu juga selalu apa kami jaga Pak karena itu merupakan bagian dari anggaran pendidikan.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI, S.S., M.M.):**

Terima kasih kembali, Pak Subandi.

Bapak-Ibu,

Demikian para narasumber telah menyampaikan respon terhadap pertanyaan, maka izinkan Pimpinan menyampaikan beberapa konsep keputusan mohon ditayang.

Nggih Pak, silakan Pak.

**KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (Drs. SYARIF BANDO, M.M.):**

Mohon izin ibu jika berkenan.

Ini terkait ada jadwal mau ke Klungkung 13.30 WIB.

**KETUA RAPAT :**

Waduh, ya udah kita cepet aja ya langsung oke ya. Iya, Pak.

Baik atau mau duluan Pak, monggo Pak. Tadi Pak Nino juga sama, mungkin mengejar pesawat yang.

**KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (Drs. SYARIF BANDO, M.M.):**

Izin, mungkin nanti Bu Sestama yang, kami mau meresmikan perpustakaan di Klungkung Bali, Bu.

Terima kasih, Bu.

**KETUA RAPAT :**

Ya, selamat bekerja Pak.

**KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (Drs. SYARIF BANDO, M.M.):**

Izin Bu, maaf.

**KETUA RAPAT :**

Iya, *monggo* silakan. Iya, saya barusan ketinggalan.

Baik, kita lanjutkan Bapak-Ibu.

E. Terhadap bahan dan paparan yang disampaikan oleh narasumber, Komisi X DPR RI memberikan pandangan:

1. Mendorong Kemendikbudristek RI agar Kepala Perpustakaan sekolah memiliki kompetensi dan penilaian kinerja sesuai dengan standar nasional perpustakaan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan tidak hanya dinilai berdasarkan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah atau Madrasah.
2. Mendorong Kemendikbudristek RI untuk menambahkan indikator kualitas pengelolaan perpustakaan sekolah sebagai bagian dari penilaian kinerja kepala sekolah.
3. Mendesak Kementerian PPN atau Bappenas RI dan Kemendikbudristek RI untuk melakukan sinkronisasi untuk membuat regulasi agar Perpustakaan Nasional RI dapat memberikan dukungan pengelolaan dan pengembangan koleksi perpustakaan sekolah.

4. Mendorong Kemendikbudristek RI dan Bappenas RI agar penentuan indeks literasi tidak hanya merujuk pada UNESCO, tetapi juga berdasarkan unsur-unsur pembangunan literasi masyarakat yang dirumuskan oleh Perpustakaan Nasional.
5. Mendorong Kemendikbudristek RI dan Kementerian PPN atau Bappenas RI agar pustakawan menjadi prioritas pengadaantena pada tahun anggaran yang akan datang berdasarkan peta kebutuhan pustakawan yang disusun oleh Perpustakaan RI.
6. Mendorong Kemendikbudristek RI, Kementerian PPN atau Bappenas RI, Kemenkeu PMK RI dan Perpustakaan Nasional RI bekerja dengan Kementerian dan Lembaga lain yang memiliki program literasi untuk menyepakati lembaga yang akan memimpin pelaksanaan program-program literasi.
7. Mendesak Kemendikbudristek RI untuk mengevaluasi kurikulum PAUD agar pengenalan atau pertumbuhan budaya literasi tidak dimulai dengan membaca atau menulis, namun melalui kegiatan yang disesuaikan dengan perkembangan mental anak.

Teman-teman Komisi X ada tambahan? Pak Ketua, Pak Andi, Prof? Cukup.

Baiklah, seperti layaknya sebuah orkestra, ini literasi itu berada di beberapa kementerian lembaga yang memiliki peran-peran sama pentingnya.

**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA INDONESIA KEMENDIKBUDRISTEK RI (Prof. H. ENDANG AMINUDIN AZIZ, M.A., Ph.D.):**

Bu Ketua, Pimpinan boleh saya bertanya satu hal yang.

Yang tadi kesimpulan rapat nomor 5 itu Bu ya untuk pengadaan pustakawan apakah maksudnya pustakawan di sekolah atau pustakawan di perpustakaan di daerah atau di mana?

**KETUA RAPAT:**

Tenaga pendidikan perpustakaan Pak, di sekolah.

**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA INDONESIA KEMENDIKBUDRISTEK RI (Prof. H. ENDANG AMINUDIN AZIZ, M.A., Ph.D.):**

Baik, baik.

**KETUA RAPAT:**

Di sekolah, Pak. Ini adalah masalah kita pada saat kita pertama kali berada dalam kurun waktu pengadaan satu juta guru dan tenaga kependidikan, kalau kita membuat Panja ternyata pustakawan *enggak* ada slotnya. Padahal jumlahnya banyak sekali dan kita meyakini bahwa kalau perpustakaan itu dijaga di sekolah itu dijaga oleh seorang pustakawan, tentu proses pengenalan anak-anak terhadap hal-hal yang berkaitan dengan literasi akan lebih lebar lagi kesempatannya.

Saya kira demikian.

**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA INDONESIA KEMENDIKBUDRISTEK RI (Prof. H. ENDANG AMINUDIN AZIZ, M.A., Ph.D.):**

Satu lagi, Bu.

**KETUA RAPAT:**

Silakan, Pak.

**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA INDONESIA KEMENDIKBUDRISTEK RI (Prof. H. ENDANG AMINUDIN AZIZ, M. A., Ph. D.):**

Jadi untuk koordinasi isu-isu lintas seperti ini Bu biasanya kami dikoordinasikan oleh Kemenko PMK, Bu.

**KETUA RAPAT:**

Iya, ini Kemenko PMK tidak hadir, kemudian Kemenkeu juga tidak hadir. Iya, PMK dulu berarti gitu ya Pak? PMK dulu yang di depan ya. Sebenarnya program itu sudah ada dan banyak sekali hanya dirijennya, dirijennya Bappenas atau perpustakaan atau Kemendikbud gitu ya.

**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA INDONESIA KEMENDIKBUDRISTEK RI (Prof. H. ENDANG AMINUDIN AZIZ, M.A., Ph.D.):**

Koordinasi untuk pelaksanaan dan pengendalian itu ada di Menko PMK, Ibu.

**KETUA RAPAT:**

Ya terus *domain*-nya di mana?



**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA INDONESIA KEMENDIKBUDRISTEK RI (Prof. H. ENDANG AMINUDIN AZIZ, M.A., Ph.D.):**

Nah itu ya kalau memang perlu *domain* nanti diinisiasi.

**KETUA RAPAT :**

Di Bappenas?

**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA INDONESIA KEMENDIKBUDRISTEK RI (Prof. H. ENDANG AMINUDIN AZIZ, M.A., Ph.D.):**

Bukan, Menko. Jadi sama-sama duduk untuk menyepakati itu.

**KETUA RAPAT:**

Oh baiklah, mudah-mudahan tahun 2024 langkah kita sudah lebih maju, sehingga indeks literasi di Indonesia akan menjadi bertambah lebih baik.

Pak Fikri mau menambahi?

**WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI (Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH):**

Tadi berarti tidak hanya menyepakati siapa yang memimpin, tapi disertai pedoman.

**KETUA RAPAT :**

Ya, membuatkan pedoman ya.

**WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI (Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH):**

Kalau selama ini sudah ke Menko PMK berarti ya tadi kan kalau dibutuhkan ada pedoman ya akan mengikat.

**KETUA RAPAT :**

Mendorong Kemenko PMK, Kemendikbudristek, Bappenas dan Perpustakaan Nasional kerjasama dengan K/L lain untuk menyepakati lembaga yang akan memimpin pelaksanaan program-program literasi dan menyusun pedoman pelaksanaannya. Iya aku juga mau ngejar pesawat nih, pesawat tempur.

Baiklah. Demikian konsep keputusan Bapak-Ibu. Konsep keputusan yang sudah diperbaiki dapat disetujui? Setuju.

**(RAPAT:SETUJU)**

**(KETUK PALU 1 KALI)**

Terima kasih. Mantap, terima kasih.

Sebelum kami tutup apakah masih akan ada yang disampaikan Bapak - Ibu? Cukup. Prof cukup, Bu Sestama? Cukup?

**F-PKB (Drs. H. ANDI MUAWIYAH RAMLY, M.Si.):**

Bu, usul terakhir.

Bagaimana kalau kita panggil kembali Bapak-Bapak ini untuk rapat berikutnya untuk melengkapi. Kemenkeu kan tidak datang, masih perlu sekali kelihatannya untuk menjalin proyektra tadi kalau satu pemainnya *nggak* datang kan *nggak* bagus orkestranya itu, Bu.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Kalau dalam sebuah air orkestra ada alat musik yang *nggak* datang itu Pak kira-kira tidak harmoni ya Pak, tapi saya kira dengan janji suatu hari kita berharap dalam rapat RDP berikutnya, langkah-langkah sudah semakin baik dan seluruh alat musik. Eh bukan ya Kementerian yang diundang komplit berupaya dan berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan meningkatkan literasi di Indonesia.

Selesailah sudah cara Rapat Dengar Pendapat pada hari ini dengan seizin Anggota Komisi X dan hadirin sekalian, kami tutup dengan ucapan semoga kita semua sabar dan terima kasih juga kepada teman-teman TA, Sekretariat dan seluruh staf pendamping, Bapak-Ibu narasumber yang hadir pada hari ini yang telah dengan sabar dan penuh pengertian mengikuti acara Rapat Dengar Pendapat pada hari ini.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Rapat saya nyatakan ditutup.

**(KETUK PALU 3 KALI)**

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 17.05 WIB)**

a.n. KETUA RAPAT  
**SEKRETARIS RAPAT**

TTD

**Dadang Prayitna, S.IP., M.H.**  
NIP. 196708061990031003